



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023



Jl. Jenderal Sudirman No.22 Samarinda Tlp. 0541-736850 , fax 0541-748895

E-mail : disparkaltim@gmail.com website : pariwisata.kaltimprov.go.id

wonderful
indonesia 

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun untuk Tahun 2019 – 2023 menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P- RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan memajukan ekonomi Kalimantan Timur diproyeksikan sebagai transformasi ekonomi hijau dalam upaya menggantikan ketergantungan terhadap Migas dan Batubara.

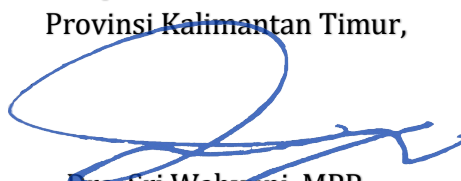
Keberhasilan pembangunan pariwisata Kalimantan Timur dapat terwujud dengan strategi lintas sektor. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Stakeholder kepariwisataan dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah, Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata, Para swasta (investor), para pelaku usaha jasa pariwisata, para perhimpunan wisata, para komunitas wisata, Lembaga pendidikan pariwisata, dan juga media.

Untuk itu disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pariwisata ini agar bisa membantu kita semua sebagai referensi terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pembangunan Kepariwisataan yang mampu memperkuat perekonomian daerah kedepannya.

Samarinda, Januari 2022

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur,


Dra. Sri Wahyuni, MPP.

Pembina Utama Madya
NIP 19701229 199003 2 003



DAFTAR ISI BUKU

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Ringkasan Renstra -----	iv
 BAB I PENDAHULUAN -----	 1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	2
1.3 Maksud dan Tujuan -----	3
1.4 Sistematika Penulisan -----	3
 BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH -----	 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kalimantan Timur -----	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kalimantan Timur -----	10
2.2.1 Sumber Daya Manusia -----	10
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) -----	12
2.2.3 Sumber Anggaran -----	13
2.3 Kinerja Pelayanan PD -----	14
2.4 Review Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018 -----	16
2.5 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan PD -----	18
2.5.1 Peluang -----	18
2.5.2 Tantangan -----	19
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH -----	 20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kaltim -----	20
a. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata Strategis-----	22
b. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata -----	24
c. Permasalahan Pengembangan Industri dan Kelembagaan -----	26
d. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kreatif -----	28
e. Permasalahan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pariwisata -----	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Terpilih ----	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota -----	36
3.3.1. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2014 – 2019 -----	36
3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten/ Kota -----	41
3.4 Telaahan Renstra Pariwisata Daerah Lain -----	48
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) -----	53
3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis -----	63



3.7 3.7.Matrik Analisa Lingkungan Strategis [SWOT] -----	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN -----	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kalimantan Timur -----	67
4.1.1 Tujuan -----	67
4.1.2 Sasaran -----	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN-----	74
5.1 Strategi -----	75
5.2 Arah Kebijakan -----	76
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF -----	78
6.1 Program / Kegiatan-----	78
6.2 Kelompok Sasaran -----	80
6.3 Pendanaan Indikatif -----	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	92
7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD -----	92
BAB VIII PENUTUP -----	100





Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tupoksi PD dan disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif yang berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 - 2023.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan

Timur setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK) . Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis, adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. [Peraturan Presiden No 142 Tahun 2018 Tentang Rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018 – 2025;](#)
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;](#)
16. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
20. [Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;](#)
21. [Draft Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025;](#)
22. Peraturan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
23. [Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/0022/B.PPEPD-Bapp/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis \(Renstra\) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.](#)
24. [Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah \(Talanpekda\) Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025.](#)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk maksud:

Sebagai gambaran pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur secara komprehensif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya yang dapat menjadi acuan selama 5 tahun periode 2019-2023.

1.3.2. Tujuan

Dengan tujuan untuk :

Mensinergikan bersama seluruh stakeholder terhadap rencana pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur periode 2019-2023.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian utama, yakni meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

1.4Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi / kabupaten / kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab./ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

Merupakan penjelasan penyelarasan antara tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian usaha jasa pariwisata;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan karya seni budaya;

- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat:
 - a. Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Subbagian Keuangan ; dan
 - c. Subbagian Umum
- 3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata:
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- 4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
 - a. Seksi Data dan Informasi Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerjasama Pariwisata.
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata; dan
 - c. Seksi kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif:
 - a. Seksi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 - b. Seksi pengembangan ruang kreasi; dan
 - c. Seksi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel II.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim
 (berdasar Perda Prov. Kaltim No. 1/2021 dan Pergub Kaltim No.19/2021)



2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sampai akhir tahun 2020 sebanyak 50 orang yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 20 orang dan pejabat fungsional umum sebanyak 30 orang. Untuk pejabat struktural meliputi:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) Pejabat eselon II | : 1 orang |
| 2) Pejabat eselon III | : 5 orang |
| 3) Pejabat eselon IV | : 14 orang |

Jika dilihat dari jenjang pendidikan formal, jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------|
| 1) Pasca Sarjana | : 8 orang |
| 2) Sarjana / D4 | : 28 orang |
| 3) D III | : 6 orang |

- 4) D II/I : 0 orang
- 5) SLTA sederajat : 11 orang
- 6) SLTP : 3 orang

Berdasarkan pangkat dan golongan

- 1) Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang
- 2) Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
- 3) Pembina (IV/a) : 6 orang
- 4) Penata Tingkat I (III/d) : 19 orang
- 5) Penata (III/c) : 8 orang
- 6) Penata Muda Tk. I (III/b) : 9 orang
- 7) Penata Muda (III/a) : 3 orang
- 8) Pengatur Tk.I (II/d) : 4 orang
- 9) Pengatur (II/c) : 3 orang
- 10) Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 2 orang
- 11) Pengatur Muda (I/d) : 2 orang

PERMASALAHAN SUMBER DAYA :

- a. Kuantitas/Jumlah sumber daya manusia /pegawai proporsional dengan beban kerja tidak proporsional dan tingkat kemampuan teknis/ ketrampilan sesuai bidang tugas belum memadai, dalam hal ini kurangnya kemampuan penguasaan teknologi informasi, manajemen pemasaran serta kemampuan berbahasa asing;
- b. Kualitas sumber daya manusia banyak yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Perubahan pola pikir, sikap, perilaku profesionalisme dan transformasi birokrasi masih lambat dan memerlukan waktu percepatan

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Dinas Pariwisata Prov. Kaltim didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi:

a) Gedung Kantor

Prasarana gedung kantor yang ditempati oleh Dinas Pariwisata Kaltim merupakan gedung milik Pemprov Kaltim. Luas tanah 2058,012 M2, dengan luas bangunan gedung Lt.1 699, 008 M2; Lt.2 698,490 M2; Lt.3 542,934 M2, atau sekitar 1940,432 M2 total luasan gedungnya.

b) Jaringan Internet dan Telepon PABX

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari kantor Dinas Pariwisata telah di-sambungkan dengan fasilitas komunikasi yang berupa sambungan telepon PABX sejumlah 12 (dua belas) titik sambungan yang menghubungkan antar ruangan dan antar bidang/sekretariat di lingkungan Dinas Pariwisata, dan 6 (enam) sambungan SLJJ, Sedangkan untuk keperluan komunikasi dengan berbagai pihak yang membutuhkan data/informasi melalui jaringan internet maupun intranet telah disambungkan jaringan internet sebanyak 25 (dua puluh lima) titik sambungan desk-top dan 7 (tujuh) titik *hot-spot*.

Perlu diperhatikan kembali jaringan – jaringan telepon untuk efisiensi, karena tidak semuanya dimanfaatkan maksimal.

c) Meubelair

Jenis meubelair minimal dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi sehari-hari berupa meja-kursi kerja sebanyak jumlah personil yang ada di Dinas Pariwisata, meja komputer , almari, *filling cabinet*, meja-kursi rapat, dan meja-kursi tamu.

d) Komputer/Mesin Ketik

Jumlah komputer yang dimiliki untuk mendukung tugas dan fungsi ada 25 unit, printer 16 (enam belas) unit, scanner 4 (empat) unit dan jumlah mesin ketik manual sebanyak 4 (empat) buah dengan kondisi rusak sehingga seringkali memerlukan perawatan lebih.

e) Sarana mobilitas

Mengingat tugas dan fungsinya berupa rapat koordinasi dengan instansi lain baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten,

memantau pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi – tugas pembantuan – dana alokasi khusus, memantau pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan serta pembinaan di pemerintah kota maupun kabupaten, maka diperlukan sarana transportasi yang berupa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Kendaraan roda 2 (dua) operasional yang dimiliki sebanyak 2 (dua) unit dan roda 4 sebanyak 8 unit.

PERMASALAHAN

- a. Sarana dan prasarana gedung perkantoran layak, hanya saja masih perlu peningkatan pengadaan ruang untuk masyarakat dapat mengakses informasi Pariwisata Kalimantan Timur.
- b. Sarana dan prasarana kerja di masing-masing bidang/seksi/subag (Mobile Computer/Laptop dll) masih kurang dan belum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga kinerja aparatur belum optimal;

2.2.3. SUMBER ANGGARAN

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur didukung dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun APBN. Berikut ini perkembangan dana dari tahun 2015– 2018 baik APBD maupun APBN.

Tabel II.2

**PERKEMBANGAN DANA APBD (MURNI)
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016-2021**

NO	JENIS BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	8.213.513.985	8.192.573.000	8.612.315.000	8.627.582.000	9.360.321.000	11.018.492.000
2	Belanja Langsung	25.661.050.000	5.050.000.000	5.760.005.000	12.817.000.000	11.291.395.532	18.557.764.000
	Total	33.874.563.985	13.242.573.000	14.372.320.000	21.444.582.000	20.651.716.532	29.576.256.000

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Tabel II.3
PERKEMBANGAN DANA APBN (DEKONSENTRASI)
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016-2020

NO	Perangkat Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pariwisata Kalimantan Timur	5.614.238.000	1.357.000.000	2.309.497.000	1.686.572.000	50.244.000

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Kinerja pelayanan PD Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (hal ini disesuaikan kemampuan APBD). Diharapkan tahun-tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur maupun melalui PD dan stakeholders lainnya terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program/ kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang sudah tertera dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (2019-2023) diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampau. Harapan ini dimungkinkan terealisasi jikalau kondisi Provinsi Kalimantan Timur setidaknya terwujud aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas stakeholders pariwisata maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berjalan baik dan lancar.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berusaha untuk mengimplementasikan program/kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan (sadar wisata) juga sebagai kepedulian terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 4 program strategis yang hal ini Sesuai pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan;
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan keempat program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stakeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kalimantan Timur maupun RIPPARDA Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja lainnya seperti Jumlah Desa Wisata, jumlah Kelompok Sadar Wisata dapat mencapai target sesuai diharapkan, sedangkan satu (1) indikator kinerja yang tidak pernah tercapai adalah indikator Lama Tinggal Wisatawan/ Length of Stay .

2.4. REVIEW PELAKSANAAN RENCANA STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2018

Nomenklatur Dinas sampai dengan tahun 2016 adalah mengampu bidang kebudayaan dan bidang kepariwisataan dengan dua UPTD yaitu UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum Negeri Mulawarman di Tenggarong.

Review Visi Misi Tujuan Sasaran Dinas Budpar 2014 – 2018 ;

Visi : Terwujudnya Kalimantan Timur sebagai Daerah Tujuan Pariwisata yang Berdaya Saing

Misi :

- 1) Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata Kalimantan Timur yang berdaya saing
- 2) Meningkatkan Industri Pariwisata Kalimantan Timur Sebagai Penopang Perekonomian Daerah
- 3) Meningkatkan Kualitas Karya Seni Budaya Daerah Sebagai Daya Tarik Wisata
- 4) Meningkatkan Penyelenggaraan Pariwisata Yang Profesional Dan Akuntabel

Tujuan :

- 1) Meningkatnya kepariwisataan Kalimantan Timur yang berdaya saing;
- 2) Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas persembahan seni budaya yang mendukung daya tarik pariwisata;
- 4) Maksimalnya penyelenggaraan kepariwisataan yang profesional dan akuntabel.

Sasaran :

- 1) Daya tarik wisata unggulan di 7 KPP berdaya saing;
- 2) Kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisata nusantara meningkat;
- 3) Jenis usaha pariwisata Kalimantan Timur terkendali;
- 4) Banyaknya karya seni budaya yang dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata;
- 5) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 6) Meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur
- 7) Terpenuhinya urusan kelembagaan pemerintah daerah
- 8) Dokumen Perencanaan, Pengendalian, evaluasi disusun tepat waktu

Telaahan pencapaian visi misi Disbudpar 2014-2018 :

- 1) Bahwa dalam pencapaian destinasi pariwisata yang berdaya saing telah diwujudkan dalam pengembangan destinasi kepulauan derawan dan sekitarnya menjadi destinasi yang dikenal secara internasional dengan terbangunnya bandara di pulau maratua kabupaten Berau sekaligus perhatian terhadap pulau terluar Kalimantan Timur.

Hal ini terbukti pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2016 menempati Juara II, kategori Surga Tersembunyi Terpopuler : PULAU MARATUA – BERAU, KALIMANTAN TIMUR dan sebagai Juara III, kategori V: Tempat Menyelim Terpopuler : PULAU DERAWAN – BERAU, KALIMANTAN TIMUR

Permasalahan dan Tindak Lanjut :

Sampai akhir periode 2018 belum adanya rute penerbangan komersial ke Pulau Maratua secara langsung baik dari Bandara Kalimarau Berau maupun dari bandara Balikpapan sebagai salah satu akses pintu masuk sehingga perlu ditindak lanjuti dengan pemanfaatan secara maksimal bandara pulau maratua.

Selama tahun akhir 2017 dan 2018 pemanfaatan bandara Pulau Maratua telah didarati pesawat jenis ATR yang sifatnya *charter flight* oleh pengusaha resort yang ada di Pulau Maratua yang diterbangkan dari Bandara Balikpapan setiap hari sabtu.

Perlu juga di kembangkan dalam masa yang akan datang terhadap potensi destinasi daya saing Kalimantan Timur lainnya yaitu ;

- a. Rangkaian pegunungan Karst sangkulirang – mangkalihat (Kutai Timur – Berau).

Juara I Situs Sejarah Terpopuler (*Most Popular Historical Site*) – Sangkulirang Rock Arts (Kabupaten Kutai Timur), dan Juara Favorite Pariwisata Indonesia Terfavorit (*Indonesia's Most Favorite Tourism*) ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017.

- b. Tujuan wisata budaya Kutai Kartanegara (Erau adat Festival dan Pulau Kumala).

Juara 2 Tujuan Wisata Baru Terpopuler (*Most Popular New Destination*) – Pulau Kumala (Kabupaten Kutai Kartanegara) – ajang Anugerah Pesona Indonesia 2017.

Pada anugerah API tahun 2016, Juara I, kategori VII. Festival Budaya Terpopuler : FESTIVAL ERAU KARTANEGARA – KALIMANTAN TIMUR

- c. Potensi eksotisme Sungai Mahakam hulu-hilir (Kutai lama – Samarinda – Tenggarong – Kota Bangun – Kutai Barat – Mahakam Ulu).
- d. Potensi keanekaragaman flora fauna Kalimantan Timur (pesut Mahakam, orang utan, bekantan, burung enggang, tumbuhan endemik, dan lain-lain).
- e. Potensi sejarah dan *way of life* (kebudayaan suku-suku di Kaltim), dan;
- f. Keanekaragaman sajian kuliner Kalimantan Timur.

Pada ajang API tahun 2018 Kaltim terpilih untuk kategori makanan tradisional populer : Sop Tekkalo dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 2) Pengembangan dan pembinaan terhadap jasa industri pariwisata, peningkatan kualitas SDM, serta promosi telah dilakukan selama kurun Renstra 2014-2018 namun belum signifikan untuk mencapai tujuan sebagai destinasi yang berdaya saing, sehingga perlu strategi dan dukungan yang lebih agresif, beragam serta fokus pada perubahan pola minat kunjungan wisatawan milenial saat ini.
- 3) Konektifitas antar pemangku kepentingan pariwisata perlu peningkatan dan pengembangan lebih lanjut, (Pemerintah daerah – pelaku jasa industri pariwisata – masyarakat pariwisata – akademisi – perhimpunan-perhimpunan / komunitas kepariwisataan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah media).

2.5. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisata.

2.5.1. Peluang

- 1) Berkembangnya industri pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kaltim yang begitu pesat dan menjajikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

- 2) Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau di Kaltim Sebagai Daerah Penyangga IKN.
- 3) Image atau branding pariwisata Kalimantan Timur Sebagai Destinasi Ekowisata
- 4) Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kalimantan Timur berupa alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar daerah Kaltim.
- 5) Kesadaran dan kebutuhan wisata masyarakat Kaltim yang meningkat cukup tinggi.
- 6) Situasi politik, keamanan dan kenyamanan Kaltim yang cukup kondusif.
- 7) Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan Kaltim yang dikembangkan dan dibina oleh PD lain.
- 8) Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kaltim (digitalisasi pariwisata).
- 9) Berkembangnya Komunitas Kreatif dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur.

2.5.2. Tantangan

- 1) Kondisi Geografis yang terdiri dari sungai, laut, danau dan pulau pulau memerlukan aksesibilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas pariwisata
- 2) Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kaltim sebagai pesaing/ kompetitor.
- 3) Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sejak tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Kaltim punya daya saing tinggi dan berstandar.



Pegunungan Karts Sangkulirang Mangkalihat

BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kondisi/ aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kaltim

Permasalahan pembangunan pada sektor pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan potensi ekonomi kreatif yang bersumber dari seni budaya daerah adalah sebagai berikut:

Permasalahan Pokok :

“Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah”.

Dalam mengembangkan suatu destinasi agar layak/siap jual perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya *Attraction* (Atraksi/Daya Tarik), *Accessability* (Aksesibilitas), *Amenities* (Amenitas/Fasilitas), dan *Ancillary* (Kelembagaan). Aspek-aspek ini harus terpenuhi guna terwujudnya destinasi wisata yang berkembang dan siap jual.

Belum berkembangnya destinasi pariwisata di Kalimantan Timur ini akhirnya berimbas pada Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laporan BPS Provinsi Kaltim, PDRB Kaltim 2017 Menurut Lapangan Usaha (dalam milyar rupiah) Pertambangan dan Penggalan menempati urutan pertama sebesar

274.361,57, selanjutnya Industri Pengolahan sebesar 112.988,76, dan Konstruksi 47.802,42. Sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5.489,50 yang sebagai representasi perkembangan pariwisata menempati urutan ke-11 dari total APBD Total PDRB Kaltim 592.502,52 atau 0,93% dari struktur APBD Provinsi Kaltim.

Namun catatan ini masih belum mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap struktur APBD secara utuh, karena variabel yang dicatat hanya berdasarkan penyediaan akomodasi dan makan minum sedangkan variabel untuk bidang pariwisata sangat kompleks, seperti biaya konsumsi yang dikeluarkan wisatawan, sektor pertanian perkebunan dan kelautan yang mendukung pariwisata, kedai makanan atau warung yang berada disekitar wisatawan sebagai dampak dari aktifitas pariwisata belum terhitung secara data.

Kesimpulannya potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap struktur APBD Kaltim masih optimis lebih dari catatan yang disampaikan.

Permasalahan Umum :

Sebagai akibat dari masih kecilnya sumbangan sektor pariwisata terhadap struktur pembentukan APBD Kaltim adalah masih rendahnya kunjungan wisatawan baik nusantara (wisnus) maupun mancanegara (wisman) ke Kalimantan Timur secara nasional. Hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi wisatawan.

Wisman yang berkunjung ke Kaltim dari data Tahun 2017 berdasarkan 19 pintu masuk utama secara nasional Kaltim urutan ke-14 atau sebesar 0,03 %.

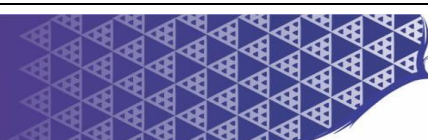
Sedangkan rata-rata lama tinggal wisatawan asing di Kaltim pada tahun 2016 adalah 3,23 hari dan tahun 2017 sebesar 2,47 hari, sementara catatan tertinggi sebesar 4,90 hari pada 2017 di Sulteng.

Rata-rata lama tinggal wisatawan Indonesia pada 2016 sebesar 1,47 hari dan 2017 sebesar 1,66 hari, sementara tertinggi 2,54 hari di Papua Barat. (*data BRS BPS 2017*).

Sehingga dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur yaitu :

- 1) Belum banyak produk wisata yang siap jual.

Pembangunan destinasi wisata strategis Kalimantan Timur belum siap jual, bisa diartikan belum fokus terhadap salah satu untuk meningkatkan nilai



daya saingnya menjadi salah satu destinasi wisata yang utuh dan siap didatangi wisatawan.

- 2) Belum maksimalnya strategi pemasaran pariwisata. Promosi merupakan langkah pengenalan untuk mengangkat nilai sebuah produk agar dikenal dan laku, tentu langkah ini butuh banyak energi dan biaya agar tepat sasaran dan efektif efisien. Dunia digital belum diperankan secara maksimal sampai dengan saat ini. Tentunya diperlukan upaya yang sangat baik agar semua berjalan lancar dan bermanfaat banyak terhadap promosi pariwisata Kalimantan Timur.
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata. Masyarakat perlu ditingkatkan kualitas sadar wisatanya, peran pembangunannya dalam pembentukan lembaga-lembaga pariwisata seperti Asosiasi, Kelompok sadar wisata dan lain-lain.
- 4) Belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, sebagai pendukung daya tarik wisata.
Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik).
- 5) Belum optimalnya kinerja layanan administrasi Dinas Pariwisata.

Akar Permasalahan :

Berbagai faktor yang mempengaruhi sebagai akar permasalahan seperti berikut ;

a. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata Strategis :

- 1) Pembangunan infrastruktur pariwisata belum fokus sehingga tidak mudah dijangkau dan mahal.
Belum tuntasnya pembangunan ini terlihat dari beberapa aspek diantaranya :

Permasalahan Aspek Aksesibilitas :

Akses darat ke objek wisata masih sulit, akan berdampak pada waktu dan cost pengeluaran.

Jalan utama menuju destinasi wisata, akses udara, transportasi umum belum terintegrasi baik. Akses pendukung ke destinasi unggulan belum bagus. Jarak tempuh dari Pintu masuk ke destinasi jauh dan lama. Seperti terlihat pada

akses menuju salah satu potensi destinasi unggulan orang utan, pohon ulin, pantai berau, arung jeram mahakam ulu dan juga pegunungan karts Kutai Timur dan Berau.

Akses udara, darat dan air menuju destinasi unggulan antar Kabupaten/ Kota dan ke Luar Daerah belum terkoneksi baik.

Hampir 80 % wisatawan ke destinasi wisata menggunakan jalur udara, sisanya jalur darat dan air. (data rilis Kemenpar 2017).

Akses udara utama masuk ke Kaltim baru melalui Bandara Balikpapan dan Berau, sedangkan potensi destinasi unggulan Kaltim tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota yang jaraknya jauh.

Permasalahan Aspek Amenitas :

Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh.

Belum dibangun maksimal ketersediaan sarpras pendukung kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar Jalan lingkungan, jaringan air bersih, dan listrik, juga permasalahan utiliti dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah/ sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan lain-lain.

Sarpras belum lengkap dan tidak terawat sedangkan banyak dokumen perencanaan pembangunan fasilitas wisata yang belum terealisasi pembangunan fisiknya.

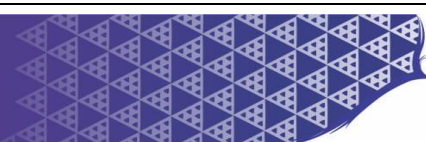
Permasalahan Aspek Atraksi :

Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan.

Pariwisata pedesaan sebagai minat utama wisatawan saat ini belum dikembangkan secara maksimal.

Strategi pengembangan wisatawan pedesaan sebagai upaya pemerataan ekonomi masyarakat yang langsung dapat berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat.

Potensi pariwisata yang berbasis budaya belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal sementara keunggulan pariwisata Indonesia bertumpu pada potensi budaya sebesar 60 persen, potensi alam sebesar 35 persen, dan



diikuti dengan potensi buatan manusia sebesar 5 persen. (berita Kemenpar 2017).

- 2) Penyediaan sarana prasarana penunjang kepariwisataan belum memadai baik kuantitas maupun kualitas.
- 3) Pengelolaan atraksi wisata belum optimal, baik wisata bahari, minat khusus, alam, dan buatan.

Wisata bahari dan minat khusus Kalimantan Timur memiliki potensi yang luar biasa jika dikelola dan direncanakan dengan baik pengembangannya. Tercatat ada 49 (empat puluh sembilan) destinasi wisata bahari yang tersebar di Kalimantan Timur diantaranya adalah destinasi wisata KSPN Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya yang turut menyumbang hadirnya wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di Kaltim. (Sumber :olah data Dispar 2017) Sama halnya dengan wisata bahari dan minat khusus, potensi wisata alam dan buatan pengelolaannya juga belum maksimal. Pengembangan wisata alam dan buatan beberapa tahun terakhir bersifat menyebar. Sehingga wisata alam dan buatan yang ada kurang terdengar gaungnya ke khalayak luas

- 4) Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.

Hal ini adalah komitmen penyelenggara pemerintah daerah untuk bersinergi membangun pariwisata berkomitmen dengan dukungan lintas sektor, secara bersama dan kompak

- 5) Profil investasi pariwisata belum tersedia secara optimal sehingga belum dapat menjangkau Investasi sektor pariwisata secara luas.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan pariwisata.
- 7) Kajian kawasan pariwisata yang akan dikembangkan belum tersedia secara optimal.

b. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata:

- 1) Data dukung kepariwisataan belum tersedia secara memadai (Nesparda, Analisis Pasar Pariwisata, Statistik kepariwisataan).

Belum adanya analisa pasar yang tajam untuk tiap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur menyebabkan kegiatan pemasaran yang selama ini dijalankan bersifat global. Seyogyanya sebuah destinasi mempunyai analisa

pasar yang jelas, agar pemasaran yang dilakukan lebih maksimal dan tujuan mengundang banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Timur tercapai. Selain itu belum adanya pencitraan yang kuat dan mampu membuat destinasi Kaltim lebih kompetitif di lingkungan regional maupun internasional.

Top 3 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kaltim tahun 2017 ditempati oleh Singapura, Australia dan Malaysia. (Sumber : Olah Data Kemenpar 2018)

- 2) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi. Pariwisata;

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini, harusnya diikuti pula dengan percepatan informasi. Data dan informasi pariwisata Kalimantan Timur sedang disusun agar menjadi lebih informatif.

Belum adanya data akurat kunjungan wisman dan wisnus dari kabupaten/Kota, Belum adanya ketersediaan SDM berbasis IT dan sarana yang memadai dalam pengelolaan data dan informasi serta Belum optimalnya input data yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota dan Mitra Pariwisata menjadi faktor yang menyebabkan belum terkelolanya data dan informasi belum terkelola maksimal.

- 3) Pelaksanaan promosi pariwisata belum kuat dan optimal.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, sama halnya dengan data dan informasi pariwisata, promosi pariwisata juga dituntut untuk lebih variatif, kreatif dan inovatif. Strategi promosi pariwisata konvensional hendaknya dikemas menjadi lebih menarik. Misal event-event pameran dibuat se-menarik dan

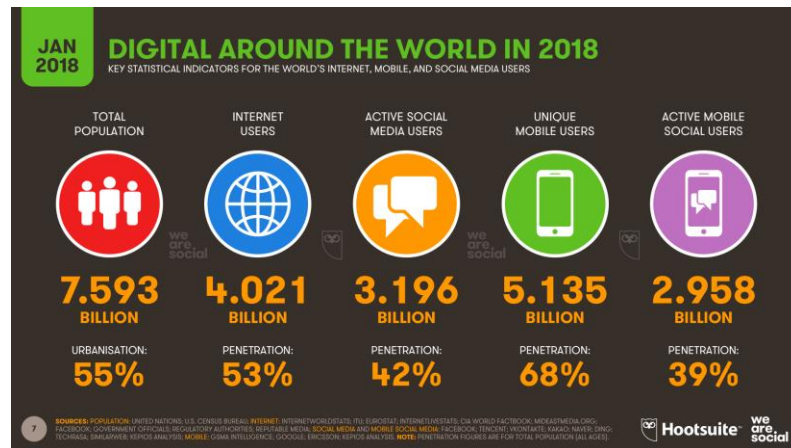
se-informatif mungkin agar dapat diterima oleh para calon wisatawan.

Demikian pula jenis promosi yang dilakukan



Promosi yang sedang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah promosi yang efektif melalui digital marketing seperti internet dan media sosial.

bahwa pengguna internet sebanyak 4.021 Milyar orang sedang pengguna sosial



Dan Indonesia berada di tempat ke-3 untuk perkembangan pengguna media sosial yaitu 23% dari total populasi pengguna media sosial seluruh dunia.

[illegible]

(Sumber :
wearesocial.com)

- 4) Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata.

c. **Permasalahan Pengembangan Industri dan Kelembagaan:**

- 1) Belum banyak industri dan SDM pariwisata yang bersertifikasi.

Kualitas SDM pariwisata sangat menentukan kualitas pelayanan pada industri pariwisata. Saat ini profesionalitas/kualitas dan kuantitas SDM pengelola Daya Tarik Wisata, pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya bisa

dikatakan belum memadai. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pelaksanaan/penerapan sertifikasi standarisasi kualitas SDM maupun kelembagaan kepariwisataan Kaltim. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sebagai asesor uji kompetensi SDM pariwisata di Kalimantan Timur sangat jarang, sehingga SDM pariwisata Kalimantan Timur agak kesulitan untuk melakukan sertifikasi. Fasilitasi pemerintah daerah dalam sertifikasi profesi telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, namun terbatas pada jenis profesi *tour planner* dan pramuwisata, selain itu jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi hanya 20 orang per kegiatan. Padahal tiap profesi sudah seharusnya ter-sertifikasi agar profesionalisme SDM Pariwisata lebih baik. Sedikitnya ada 6 bidang dan 32 sub bidang yang wajib disertifikasi. Mulai dari *front office*, *housekeeping*, *food production*, *food and beverages*, biro perjalanan, hingga *tour operator*. Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa ditarik dari sertifikasi ini. Yakni semakin memperkuat 3C, *Calibration*, *Confidence*, dan *Credibility*. Pada tahun 2018, Kemenpar RI menargetkan 125rb SDM Pariwisata tersertifikasi oleh LSP.

Selain faktor-faktor diatas, belum optimalnya kemitraan dunia pendidikan Kaltim sebagai lembaga profesional yang mencetak SDM pariwisata dengan stakeholder pariwisata Kaltim sebagai pengguna jasa SDM tersebut juga turut menjadi faktor belum maksimalnya pengelolaan SDM.

Faktor lain yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan SDM adalah masih rendahnya hubungan kemitraan/ kerjasama pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan Kaltim dengan luar daerah maupun dari luar negeri.

2) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian terhadap industri pariwisata ;

Pembinaan dan pengendalian terhadap sektor usaha sarana pariwisata juga belum maksimal karena selama ini yang telah dilakukan masih terbatas pada sektor hotel, biro perjalanan wisata dan restoran. Sedang menurut Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 setidaknya terdapat 13 sektor usaha pariwisata seperti 1.) daya tarik wisata ; 2.) kawasan pariwisata ; 3.) jasa transportasi wisata ; 4.) jasa perjalanan wisata ; 5.) jasa makanan dan minuman ; 6.) penyediaan akomodasi ; 7.) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ; 8.) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran ; 9.)

jasa informasi pariwisata ; 10.) jasa konsultan pariwisata ; 11.) jasa pramuwisata ; 12.) wisata tirta ; 13.) spa

Pembinaan dan pengendalian yang sudah dilakukan juga bersifat *sampling*, karena terbatasnya dana dan personil.

- 3) Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
- 4) Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf.

d. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Kreatif:

- 1) Belum optimalnya data subsektor ekonomi kreatif.

17 subsektor yang ada di dalam ekonomi kreatif antara lain :

1. Aplikasi
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual (DKV)
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film Animasi dan Video
8. Fotografi
9. Kerajinan Tangan (Kriya)
10. Kuliner
11. Musik
12. Penerbitan
13. Pengembangan Permainan
14. Periklanan
15. Seni Pertunjukkan
16. Seni Rupa dan
17. TV dan Radio

Dari ke 17 sub sektor ekraf di Kalimantan Timur pada beberapa tahun kebelakang baru di kembangkan secara sederhana yaitu potensi, seni pertunjukan, kriya, fasion, dan kuliner. Hal ini tentunya butuh perhatian yang serius terhadap upaya pengembangan yang berdaya saing dengan ekraf di daerah lain

- 2) Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi.

Sarana ruang kreatif menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hasil karya ciptaan kreatifitas mendapat tempat terpublikasikan kepada masyarakat dan calon peminat untuk dapat terus berkarya, selain itu dapat mengetahui keinginan pasar terhadap hasil karya kreatif yang ada.

- 3) Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf.
- 4) Belum optimalnya pengembangan subsektor ekraf.
- 5) Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.

e. Permasalahan Kapasitas Kelembagaan Dinas Pariwisata:

- 1) Belum optimalnya evaluasi kegiatan secara berkala.
- 2) Kurangnya jumlah ASN untuk menunjang kinerja dinas pariwisata.
- 3) Belum maksimalnya fasilitas perkantoran untuk menunjang kinerja dinas pariwisata.

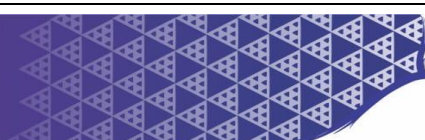
Rumusan permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

**Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur**

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar masalah
1	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah	Belum banyak produk wisata yang siap jual	1 Pembangunan infrastruktur pariwisata belum fokus sehingga tidak mudah dijangkau dan mahal. 2 Penyediaan sarana prasarana penunjang kepariwisataan belum memadai baik kuantitas maupun kualitas. 3 Pengelolaan atraksi wisata belum optimal, baik wisata bahari, minat khusus, alam, dan buatan. 4 Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal. 5 Profil investasi pariwisata belum tersedia secara optimal sehingga belum dapat menjangkau Investasi sektor pariwisata secara luas. 6 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan

			7	pariwisata. Kajian kawasan pariwisata yang akan dikembangkan belum tersedia secara optimal.
		Belum maksimalnya Strategi Pemasaran pariwisata	1 2 3 4	1 Data dukung kepariwisataan belum tersedia secara memadai (Nesparda, Analisis Pasar Pariwisata, Statistik kepariwisataan). 2 Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi. Pariwisata. 3 Pelaksanaan promosi pariwisata belum kuat dan optimal. 4 Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata.
		Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata	1 2 3 4	1 Belum banyak industri dan SDM pariwisata yang bersertifikasi. 2 Belum optimalnya pembinaan, pengendalian terhadap industri pariwisata 3 Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha. 4 Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf.
		Belum maksimalnya pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif	1 2 3 4 5	1 Belum optimalnya data subsektor ekonomi kreatif. 2 Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi. 3 Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf. 4 Belum optimalnya pengembangan subsektor ekraf. 5 Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.
		Belum optimalnya kinerja layanan administrasi Dinas Pariwisata	1 2 3	1 Belum optimalnya evaluasi kegiatan secara berkala. 2 Kurangnya jumlah ASN untuk menunjang kinerja dinas pariwisata. 3 Belum maksimalnya fasilitas perkantoran untuk menunjang kinerja dinas pariwisata.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Terpilih.

RPJPD Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun ke depan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera secara berkelanjutan.

Visi dari RPJPD 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

“ terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan ”.

Misi RPJPD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Kepariwisataaan Kalimantan Timur dalam RPJPD 2005-2025 merupakan bagian dari perwujudan misi kedua yaitu “struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya’. Pariwisata distrategikan sbb:

Strategi 1: Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan keterkaitan antar semua perangkat di sektor kepariwisataan dalam lingkup Nasional.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur kepariwisataan.
- c. Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian.
- d. Pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan.
- e. Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan kepastian jadwal.

- f. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Strategi 2: Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensial.
- b. Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promosi wisata dan berbagai pintu masuk wisata.
- c. Peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.

Strategi 3: Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan.
- b. Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensial dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event Nasional dan Internasional.

Strategi 4: Pengembangan kota pusat pelayanan wisata.

Arah Kebijakan:

- a. Penetapan dan pengembangan kota pusat pelayanan wisata.
- b. Peningkatan Infrastruktur menuju keterpaduan pelayanan pada kota pusat pelayanan wisata.

Strategi 5: Pengembangan Industri wisata.

Arah Kebijakan:

- a. Peningkatan sumberdaya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan.
- b. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.

Strategi 6: Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik.

Arah Kebijakan:

- a. Pengembangan jalur wisata unggulan.

- b. Pengadaan Infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensial.

Tahun 2018 merupakan tahapan ke-3 RPJMD Kaltim dari 4 tahapan RPJPD Kaltim 2005-2025. Sedangkan RPJPD pada tahapan RPJMD ke-4 periode 2019 – 2025 atau periode akhir dengan menitik beratkan pada :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Pemantapan Struktur Ekonomi
- c. Peningkatan Pelayanan Dasar
- d. Efisiensi dan efektifitas pemerintahan yang berbasis penegakan hukum
- e. Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Pada penyampaian visi misi Gubernur Terpilih Kalimantan Timur Periode 2018 – 2023 bahwa pada akhir RPJMD tahap Ke-4 ini, kondisi/ keadaan Kalimantan Timur yang dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup ASEAN, bahkan pada beberapa sektor pembangunan diharapkan mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific.

Dan pada Akhir periode ini, diharapkan Kalimantan Timur secara umum :

- sumberdaya manusia yang bermartabat atau memiliki karakter moral dan agama yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai;
- perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah;
- pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi;
- penegakan hukum tanpa pandang bulu; dan
- penataan ruang yang harmonis dan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaga keanekaragaman hayati yang tinggi.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Terpilih 2019 - 2023 dirumuskan sebagai berikut:

“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”.

Bahwa dibutuhkan pemimpin yang berani untuk mewujudkan kalimantan timur yang berdaulat. “Kalimantan Timur Yang Berdaulat” dimaknai bahwa rakyat Kalimantan Timur harus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Penjabaran visi tersebut meliputi :

- 1) Kalimantan Timur mampu memiliki kemandirian dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;
- 2) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- 3) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing;

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Terpilih 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pelayanan publik yang prima, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, serta berperan aktif dalam penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial;
- 2) Berdaulat dalam penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendorong lahirnya industri hilir serta mewujudkan ketahanan energi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur;
- 3) Berdaulat dalam pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh daerah Kalimantan Timur untuk pemerataan, inter-koneksi dan harmonisasi antar daerah Kabupaten/Kota sehingga menjamin kelancaran arus barang dan jasa serta iklim

investasi daerah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem;

- 4) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, jasa dan pariwisata dengan memberikan bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kemandirian usaha;
- 5) Berdaulat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan serta mewujudkan ketercukupan sandang dan papan;
- 6) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing;
- 7) Berdaulat dalam pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dengan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya serta meningkatkan prestasi Olah Raga dan Seni Budaya hingga tingkat Internasional;
- 8) Berdaulat dalam pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan tata guna lahan, pengurangan emisi dan perubahan iklim sehingga terwujud peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Program Prioritas Bidang Pariwisata merupakan perwujudan Misi Ke - 4 yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan fokus pada pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2014 – 2019

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, Rencana Strategis Kabupaten/Kota maupun RTRW. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan *linkage* dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut *Nawacita*. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

“Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”

Berdasarkan visi Kementrian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementrian Pariwisata 2015-209 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata 2015 – 2019 :

Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2019 – 2021;

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Kewenangan pariwisata di level Kementerian memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu:

1. Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
3. Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan Kepariwisataan, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Hasil telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim dengan Restra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia :

- a. Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah.
- b. Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim; secara langsung merupakan refleksi dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kaltim tahun 2013-2023. Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk kegiatan yang berskala internasional, nasional maupun lokal, Dinas Pariwisata Kaltim selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- c. Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kaltim sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di mana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

NO	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ; 2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri	✓ Kapasitas dan jenis layanan dalam sertifikasi SDM yang masih kurang memadai ✓ Belum	- Akses udara, darat dan air ke Destinasi wisata prioritas dari pintu masuk utama Kaltim belum tersambung baik,	- Berkembangnya industri pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kaltim yang begitu pesat dan menjajikan untuk dapat meningkatkan

	dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya; 3. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif 4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal	mantapnya sistem manajemen pengembangan SDM pariwisata ✓ Belum optimalnya kerjasama dengan industri dalam jasa pariwisata yang ada ✓ Belum optimalnya layanan pelatihan Usaha Jasa Pariwisata yang secara efektif	terutama akses udara dan darat, sehingga berpengaruh pada cost dan waktu. - Kulit dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai - Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; - Tingkat persaingan dengan negara / daerah lain sangat tinggi; - Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal - Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi komunitas masyarakat	ekonomi dan kesejahteraan rakyat. - Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau suatu daerah. - Image atau branding pariwisata Kalimantan Timur adalah alam dan budaya. - Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kalimantan Timur berupa alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar daerah Kaltim. - Kesadaran dan kebutuhan wisata masyarakat Kaltim yang meningkat cukup tinggi. - Situasi politik, kemandirian dan kenyamanan Kaltim yang cukup kondusif. - Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/pendukung kepariwisataan Kaltim yang dikembangkan dan dibina oleh PD lain. - Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kaltim (digitalisasi pariwisata)
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata 10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata 11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	✓ Belum terwujudnya system informasi pasar tenaga kerja yang kredibel ✓ Masih lemahnya sistem pengawasan pariwisata ✓ Masih perlunya diperbaharui berbagai sistem pemasaran pariwisata yang belum modern dan sesuai tuntutan zaman		

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten/ Kota

a. Renstra Dinas Pariwisata Kota Samarinda (2016 - 2021)

Visi :

“ Terwujudnya Kota Samarinda Menjadi Kota Tujuan Wisata Unggulan Yang Berbasis Ekonomi Kreatif ” .

Misi :

1. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata di kota samarinda
2. Meningkatkan kualitas pemasaran kepariwisataan
3. Meningkatkan Pembinaan pengembangan ekonomi Kreatif kota samarinda
4. Meningkatkan kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan
5. Meningkatkan pengembangan Sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan

Tujuan :

1. Meningkatnya jumlah objek wisata unggulan
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
3. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi kreatif
4. Meningkatnya kapasitas kinerja pelayanan dan kemitraan kepariwisataan.

Sasaran :

1. Bertambahnya Jumlah objek wisata unggulan
2. Bertambahnya kunjungan wisatawan
3. Bertambahnya Jumlah pelaku ekonomi kreatif
4. Tersedianya SDM pariwisata daerah yang profesional dan kreatif.

b. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan (2016 - 2021).

Visi :

“Terwujudnya Balikpapan sebagai daerah tujuan wisata unggulan berwawasan lingkungan serta memberdayakan potensi pemuda dan olahraga produktif, inovatif, dan prestatif ”

Misi :

1. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan
2. Pengembangan peran serta kepemudaan
3. Pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga

Tujuan :

1. Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Peran pemuda dan prestasi olah raga.
2. Terwujudnya kualitas olahraga pembibitan,permasalahan dan olahraga berprestasi.
3. Meningkatnya daya saing kepariwisataan.
4. Meningkatkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

c. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang (2016 - 2021)

Visi Walikota dan Wakil Wali Kota Bontang :

“Menguatkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi Walikota dan Wakil Wali Kota Bontang :

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City.

Tujuan Renstra Disporapar Kota Bontang :

1. Mewujudkan peran serta kepemudaan dan kepramukaan yang berkualitas dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas keolahragaan melalui pembibitan dan pemasyarakatan olahraga menuju prestasi dan kebugaran masyarakat.
3. Memaksimalkan potensi dan pemanfaatan sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
4. Memaksimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Sasaran Renstra Disporapar Kota Bontang:

1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.
2. Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.
4. Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata.

d. Renstra Dinas Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara (2016 – 2021)

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar:

“Ingin menciptakan masyarakat Madani” yakni bentuk masyarakat ideal yang diilhami oleh kehidupan agamis masyarakat Madinah yang saat itu hidup rukun, mandiri, penuh kreatifitas dan sejahtera lahir batin “

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar:

“Memberdayakan seluruh komponen (pemerintah, legislatif, masyarakat, dan investor) dalam proses pembangunan secara berkesinambungan”.

Dalam pengertian ini setiap komponen/anggota masyarakat harus secara aktif terlibat dan mengambil peran dalam gerakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip keberdayaan diri sendiri.

Tujuan Renstra Dispar Kab. Kukar :

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan akuntabel
2. Mewujudkan Kutai Kartaengara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur

Sasaran Renstra Dispar Kab. Kukar:

1. Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan.
2. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara.

e. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur (2016 – 2021)

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur Sebagai Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Misi :

1. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah
2. Mewujudkan daerah tujuan pariwisata Kutai Timur yang berdaya saing.
3. Pengembangan produk pariwisata
4. Meningkatkan penyelenggaraan dan pariwisata yang profesional dan akuntabel.

Tujuan :

1. Meningkatnya kepariwisataan Kutai Timur yang berdaya saing;
2. Meningkatnya industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah;

3. Menggali, melestarikan, mengembangkan serta meningkatnya seni dan budaya sebagai karakter jati diri dan pemersatu bangsa; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian.

Sasaran :

1. Meningkatnya prasarana dan sarana obyek wisata;
 2. Meningkatnya jumlah obyek wisata;
 3. Meningkatnya pemasaran pariwisata;
 4. Meningkatnya usaha jasa dan sarana pariwisata;
 5. Meningkatnya industri ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya dan iptek;
 6. Meningkatnya kelestarian seni budaya di Kutai Timur.
 7. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas pariwisata;
 8. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan aset dan kepegawaian Dinas Pariwisata.
 9. Meningkatnya Kapasitas Aparatur.
 10. Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pariwisata.
 11. Meningkatnya Kualitas Dinas Pariwisata; dan
 12. Meningkatnya administrasi perkantoran Dinas Pariwisata.
- f. **Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau (2016 – 2021)**
- Visi :**
- “Terwujudnya Kabupaten Berau Sebagai Destinasi Wisata Yang Terkemuka di Dunia”
- Misi :**
1. Meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
 2. Menggali, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab;
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan.

Tujuan :

Meningkatkan ekonomi daerah di sektor pariwisata.

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.

g. Renstra Dinas Pariwisata Kab. Paser (2016 – 2021)

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Paser:

“ Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Paser:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Energi, Telekomunikasi, Air bersih dan pemukiman.
2. Meningkatkan Pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
4. Memperkuat pondasi Perekonomian berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan.
6. Memperkuat Kohesifitas sosial, budaya, adat dan istiadat lokal.

Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Kab. Paser :

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pembinaan olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian
5. Meningkatkan kualitas sinergi perencanaan.

Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kab. Paser :

1. Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan

masyarakat dan kontribusi PAD dari sektor pariwisata.

2. Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16–30 tahun) dalam pembangunan.
3. Meningkatnya prestasi olahraga.
4. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan.
5. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

h. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat (2016 – 2021).

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kutai Barat:

“Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kubar:

Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan Renstra Dispar Kab. Kubar :

1. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat.
4. Mewujudkan Pengembangan kemitraan Pariwisata.
5. Mewujudkan pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
6. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing Mewujudkan Pengembangan ekonomi kreatif.

Sasaran Renstra Dispar Kab. Kubar :

1. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatun dan Kantor Yang Memadai.
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .
4. Terwujudnya Pengembangan kemitraan Pariwisata.
5. Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
6. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing.
7. Terwujudnya Pengembangan ekonomi kreatif.

Hasil Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Dengan mencermati Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dengan Renstra Dinas Pariwisata Kaltim yang merupakan perwujudan dari generalisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kaltim tahun 2013-2023 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaltim tahun 2019-2023 dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis Kab./Kota sebagian besar sudah mencerminkan sinergitas/keterpaduan dan keselarasan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kawasan di wilayah Kaltim. Hanya saja bahwa ada hal-hal sebagian kewenangan dan urusan baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/Kota yang berbeda fokus/ skala prioritasnya akan tetapi semua tidak bertolak belakang dan berorientasi untuk mewujudkan visi besar kepariwisataan yaitu menjadikan Kalimantan Timur sebagai Daerah Tujuan Wisata Berdaya yang Berdaya Saing dan Penyumbang PAD. Contoh implementasi sinergitas Kaltim dengan Kabupaten/Kota tercermin dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi menuju keberhasilan setiap program/kegiatan jangka pendek/menengah/panjang sehingga terwujudnya harmonisasi pencapaian hasil akhir yaitu terwujudnya visi besar pada tahun 2023.

3.4. Telaahan Renstra Pariwisata Daerah Lain

Perencanaan kepariwisataan di daerah tidak hanya melihat ke depan (vision based) dan ke belakang (problem based), namun harus melihat ke sekitar. Berdasar pada hal tersebut, maka telaah Renstra Daerah lain di sekitar Provinsi Kalimantan Timur harus

dijalankan. Berikut adalah beberapa Renstra Provinsi lain di sekitar Kalimantan Timur:

a. Renstra Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Visi Provinsi Kalimantan Tengah :

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).”

Misi Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemanfaatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah masih merumuskan visi dan misi perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun visi dan misi Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

Visi Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah : “Mewujudkan Daya Saing Destinasi Pariwisata, Wisata Budaya dan Religi yang Unggul”

Misi Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata unggulan, wisata budaya dan religi
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif
4. Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan
5. Mengembangkan SDM dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional dan berwawasan global

Tabel 3.3
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah
Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata unggulan, wisata budaya dan religi	Mendorong/fasilitasi perwujudan penataan obyek wisata unggulan di Kalimantan Tengah	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah	Jumlah obyek wisata unggulan yang terpasarkan
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian	a. Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan budaya b. Meningkatkan kreatifitas para seniman/budayawan dalam kiprah pengembangan seni dan budaya	a. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya b. Meningkatnya kreatifitas para seniman/budayawan dalam kiprah pengembangan seni dan budaya	a. seni budaya tradisi yang dilestarikan b. cakupan dan kajian seni budaya c. cakupan gelar seni dan budaya d. cakupan misi kebudayaan dan kesenian e. perlindungan terhadap CB/situs f. jumlah seniman/budayawan yang mendapat Anugerah Budaya g. jumlah gedung kesenian
Meningkatkan penguatan kelembagaan dan industri pariwisata yang kreatif dan inovatif	a. Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata b. Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata	a. Meningkatnya kuantitas usaha pariwisata b. Jumlah usaha pariwisata yang berprestasi	a. Jumlah usaha pariwisata b. jumlah usaha pariwisata yang mendapat Anugerah/Penghargaan pariwisata
Meningkatkan pemasaran melalui kemitraan dan kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemangku kepentingan	a. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalteng b. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat	a. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng b. Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul c. Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri	a. jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara b. jumlah event tingkat daerah, nasional dan internasional serta promosi pariwisata yang kreatif dan unggul c. jumlah kerjasama promosi pariwisata
Mengembangkan SDM dan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata yang profesional dan berwawasan global	a. Meningkatkan kualitas SDM insan pariwisata b. Meningkatkan kualitas SDM insan kebudayaan	a. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pariwisata b. tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang kebudayaan	a. jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi b. jumlah SDM kebudayaan yang kompeten dan bersertifikasi

b. Renstra Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan 2016-2021

Visi Provinsi Kalimantan Selatan :

“Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing”

Misi Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Mengembangkan SDM yang agamis, sehat, cerdas dan terampil
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis Sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan masih merumuskan visi dan misi perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan: “Kalimantan Selatan sebagai salah satu Destinasi Wisata Nasional”

Misi :

1. Meningkatkan koodinasi dengan SOPD terkait mengembangkan atraksi, amenitas dan aksesibilitas objek daerah tujuan wisata
2. Mengembangkan dan memaksimalkan promosi pariwisata Kalimantan Selatan sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung
3. Mengembangkan sumberdaya manusia pariwisata untuk mewujudkan sapta pesona pariwisata
4. Mengembangkan pembinaan dan kondisi kelembagaan mitra kerja pariwisata

Tabel 3.4
Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Jangka Menengah
Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya kesejahteraan perekonomian masyarakat disekitar ODTW (melalui usaha/industri pariwisata)	a. persentase kenaikan jumlah wisnus b. persentase kenaikan jumlah wisman c. lama tinggal wisnus d. persentase peningkatan jumlah usaha dibidang wisata
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi	a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan	a. persentase peningkatan jumlah kelompok sadar

pariwisata

wisatawan lokal

terhadap sapta

pesona

- b. Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW

wisata

b. persentase

pembangunan jumlah

objek/daya tarik

pariwisata

c. Renstra Disporapar Provinsi Kalimantan Barat 2016-2021

Visi Provinsi Kalimantan Barat :

“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”

Misi Provinsi Kalimantan Barat :

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomu masyarakat melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.

10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karenanya, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Renstra selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada tata ruang wilayah dengan memerhatikan KLHS. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah yang secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) peruntukan, yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi.

Adapun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka penelaahan RTRW dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 merupakan analisis spasial untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan urusan pariwisata beserta arah lokasi pengembangannya.

Dalam rangka menyelaraskan pembangunan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisata di Kalimantan Tengah.

3.5.1. Struktur Ruang Wilayah

Tabel 3.5
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	Rencana Sistem Perkotaan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).			
2.	Rencana Jaringan Transportasi	Sistem jaringan transportasi darat; Sistem transportasi sungai, danau dan penyeberangan; Sistem transportasi laut;	Rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan akses dan prasarana infrastruktur lainnya menuju kawasan pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pendudukan sarana menuju ODTW.	

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
3.	Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan	Sistem transportasi udara. Pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.			
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit.			
5.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Konservasi Sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan kewenangan wilayah sungai			

3.5.2. Pola Ruang Wilayah

Tabel 3.6
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1.	Rencana Kawasan Lindung	a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan lindung	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu	Pengaruhnya : Pengembangan wisata berbasis alam	Sebagaimana tercantum pada RIPPADA 2013-2023, arah lokasi pembangunan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
		c. Kawasan lindung setempat d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan e. Kawasan rawan bencana alam f. Kawasan lindung geologi	pengetahuan : a. Cagar Alam Padang Luwai/Kersik Luway b. Taman Nasional Kutai (Kutim, Bontang, dan Kubar) c. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto d. Taman Hutan Raya Lati Petangis (Paser) e. Taman Wisata Alam Laut Berau dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki (Berau) f. Kebun Raya Balikpapan	Kebutuhan : 1. Pembangunan destinasi pariwisata (mendukung prioritas pembangunan) 2. Pembinaan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar	pariwisata yaitu : Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) : 1.) DPN Long Bagun-Melak; 2.) DPN Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya; 3.) DPN Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang* dan sekitarnya Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) : 1.) KPPN Long Apari dan sekitarnya; 2.) KPPN Long Bagun dan sekitarnya; 3.) KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya; 4.) KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya; 5.) KPPN Tenggarong dan sekitarnya; 6.) KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya; 7.) KPPN Bontang- Sangatta dan sekitarnya; 8.) KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya; 9.) KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya 10.) KPPN Derawan-Sangalaki dan sekitarnya Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) : 1. KPP 1 : Kawasan Perkotaan 2. KPP 2 : Kawasan Hulu Sungai Mahakam 3. KPP 3 : Kawasan Pesisir Kepulauan 4. KPP4 : Kawasan Sedang Berkembang 5. KPP 5 : Kawasan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
2.	Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis	a. Kawasan peruntukan hutan produksi b. Kawasan peruntukan pertanian c. Kawasan peruntukan perikanan d. Kawasan peruntukan industri e. Kawasan peruntukan pariwisata f. Kawasan peruntukan permukiman g. Kawasan peruntukan pertambangan h. Kawasan peruntukan lainnya			Pesisir 6. KPP 6 : Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 7. KPP7 : Kawasan Perbatasan Negara Sebagaimana tercantum pada RIPPARDA 2013-2023, arah lokasi pembangunan pariwisata yaitu : Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) : 1.) DPN Long Bagun-Melak; 2.) DPN Tenggarong-Balikpapan dan sekitarnya; 3.) DPN Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang* dan sekitarnya Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) : 1.) KPPN Long Apari dan sekitarnya; 2.) KPPN Long Bagun dan sekitarnya; 3.) KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya; 4.) KPPN Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya; 5.) KPPN Tenggarong dan sekitarnya; 6.) KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya; 7.) KPPN Bontang- Sangatta dan sekitarnya; 8.) KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya; 9.) KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya 10.) KPPN Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya

Kawasan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
					Pengembangan Pariwisata (KPP) : 1. KPP 1 : Kawasan Perkotaan 2. KPP 2 : Kawasan Hulu Sungai Mahakam 3. KPP 3 : Kawasan Pesisir Kepulauan 4. KPP4 : Kawasan Sedang Berkembang 5. KPP 5 : Kawasan Pesisir 6. KPP 6 : Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur 7. KPP7 : Kawasan Perbatasan Negara
3.	Rencana JaringanEnergi/ Kelistrikan	Pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.			
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit.			
5.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Konservasi Sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan kewenangan wilayah sungai			

Berdasarkan telaahan mengenai Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah, dapat dirumuskan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Telaahan Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur (Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2016)

Tujuan : Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan			
Arah Kebijakan	Strategi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tinggi dan berwawasan lingkungan menjadi sektor unggulan provinsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat;	✓ perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi ✓ perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan ✓ pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi ✓ membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting	- Akses udara, darat dan air ke Destinasi wisata prioritas dari pintu masuk utama Kaltim belum tersambung baik, terutama akses udara dan darat, sehingga berpengaruh pada cost dan waktu. - Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai - Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; - Tingkat persaingan dengan negara / daerah lain sangat tinggi; - Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal - Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi komunitas masyarakat	- Berkembangnya industri pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kaltim yang begitu pesat dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. - Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau suatu daerah. - Image atau branding pariwisata Kalimantan Timur adalah alam dan budaya. - Beraneka ragam potensi Daya Tarik Wisata Kalimantan Timur berupa alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar daerah Kaltim. - Kesadaran dan kebutuhan wisata masyarakat Kaltim yang meningkat cukup tinggi. - Situasi politik,
2. Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi berkurangnya sumber daya migas dan batubara yang tidak dapat diperbaharui melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi yang dapat diperbaharui, sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan dan energi wilayah dan nasional	✓ perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah ✓ perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi ✓ pengembangankawasan		

	strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah ✓ pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional		kemanan dan nyaman Kaltim yang cukup kondusif. - Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan Kaltim yang dikembangkan dan dibina oleh PD lain. - Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kaltim (digitalisasi pariwisata)
3. Perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau;	✓ penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor-sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang ✓ penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah kawasan lindung dan wilayah Heart of Borneo (HoB) ✓ penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau		
4. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensi;	✓ pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan/atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis ✓ pemerataan pengembangan wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan kawasan pemukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat ✓ pengembangan kawasan-kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ✓ pengembangan		

	keterkaitan pusat kegiatan di kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan NKRI		
5. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan serta menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan	✓ pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan/atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan ✓ peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana ✓ penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian, dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya ✓ peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan di wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona peyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif		

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bidang Pariwisata ;

Pariwisata mempunyai target pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Hal ini mendukung tujuan ke-8 SDG's yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan 5 indikator.

Dari 5 indikator yang belum dapat di sajikan rencana dan datanya adalah indikator Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja hal ini Dinas Pariwisata belum mempunyai kegiatan yang mengarah kepada hal tersebut, sehingga diharapkan melalui Nesparda yang dilakukan oleh BPS dapat menyajikannya.

Tabel 3.8
Matrik SDG's Pariwisata

No	No TPB	Deskripsi TPB	No Target	Deskripsi Target	No Indikator	Deskripsi Indikator	Pilar	Satuan	Target					Target
									2019	2020	2021	2022	2023	2030
132	TPB 08	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	08.09	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Ekonomi	Orang	5.500.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	10.000.000
173	TPB 12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.b	Mengembangkan dan mengimplemen tasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal	12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Lingkungan	Lokasi	1	1	2	Industri Pariwisata : 4 Lokasi 3	Industri Pariwisata : 6 Lokasi 3	10

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa point sebagai isu strategis pengembangan Kepariwisata Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan IKN menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
2. Perkembangan pola hidup masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dan gaya hidup .
3. Pelaku usaha Pariwisata semakin tumbuh dan variatif.
4. Pelaku ekonomi kreatif terus tumbuh .
5. Sektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi ekonomi daerah dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya pada sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik).
6. Digitalisasi informasi menunjang promosi pariwisata yang aktif dan dinamis.
7. Asosiasi kepariwisataan semakin tumbuh.
8. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan desa wisata semakin tumbuh dan berkembang.

3.7. Matrik Analisa Lingkungan Strategis [SWOT]

Tabel 3.9
Matrik Analisa Lingkungan Strategis [SWOT]
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Analisis Lingkungan Internal (IFAS)	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Analisis Lingkungan Eksternal (EFAS)	1) Image atau branding pariwisata Kalimantan Timur Potensi ekonomi pariwisata menjadi tumpuan perkembangan ekonomi hijau di Kaltim Sebagai Daerah Penyangga IKN 2) Memiliki wisata alam yang berdaya saing dengan flora dan fauna endemik maupun langka Sebagai Destinasi Ekowisata 3) Memiliki keunikan budaya yang meliputi budaya kesultanan, pesisir dan pedalaman 4) Mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam perkembangan sejarah Indonesia yaitu berupa kerajaan Hindu tertua dan Karst tapak tangan purba yang ada di Indonesia. 5) Situasi politik, keamanan dan kenyamanan Kaltim yang cukup kondusif. 6) Komitmen Kepala Daerah terhadap pengembangan pariwisata kaltim	1) Infrastruktur menuju destinasi wisata belum memadai 2) Moda transportasi wisata masih terbatas 3) Fasilitas penunjang pariwisata terbatas dan belum memadai 4) Pengelolaan destinasi wisata masih belum berstandar 5) Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; 6) Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata belum optimal 7) Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung sadar wisata dan sapta pesona
PELUANG (opportunities)	Strategi S - O	Strategi W - O
1. Berkembangnya industri pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kaltim yang begitu pesat dan menjajikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 2. kebutuhan wisata masyarakat Kaltim yang meningkat cukup tinggi 3. Berkembang pesatnya produk-produk penunjang/ pendukung kepariwisataan Kaltim yang dikembangkan masyarakat. 4. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kaltim (digitalisasi pariwisata). 5. Berkembangnya Komunitas Kreatif dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur 6. image calon wisatawan/ wisatawan luar daerah maupun luar negeri terhadap kepariwisataan Kaltim masih cukup baik	1. Pengembangan branding pariwisata kaltim sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia 2. Pengembangan produk wisata kaltim untuk menarik minat wisatawan 3. Pengembangan pariwisata digital kaltim melalui pemanfaatan teknologi informasi 4. Pemberdayaan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif untuk menunjang pariwisata kaltim	1. Peningkatan sarana dan prasarana dasar dan penunjang kepariwisataan 2. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata 3. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Penguatan tindak lanjut hasil koordinasi kepariwisataan lintas sektoral 5. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penerapan sadar wisata dan sapta pesona

ANCAMAN (<i>Threats</i>)	Strategi S – T	Strategi W - T
1. Potensi bencana alam banjir dan kebakaran hutan 2. Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diluar wilayah Kaltim sebagai pesaing/ kompetitor untuk daya tarik wisata sejenis 3. Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sejak tahun 2015 yang mengharuskan kepariwisataan Kaltim punya daya saing tinggi dan berstandar	1. Perlindungan kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata kaltim melalui profiling kawasan 2. Peningkatan daya saing produk wisata kaltim sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia 3. Peningkatan daya saing dan standar usaha pariwisata yang berkarakter khas kaltim	1. Penyusunan mitigasi bencana kawasan pariwisata bersama lintas sektoral terkait 2. Peningkatan kerjasama pengembangan dan pemasaran pariwisata dengan daerah sekitar 3. Peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal



Islamic Center—Sungai Mahakam

BAB IV

TUJUAN & SASARAN

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan strategis merupakan proses sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab melaksanakan sebagian kewenangan Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata Kalimantan Timur sesuai dengan lingkup tugasnya. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sekaligus mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2019 - 2023 **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** dan Misi ke-2 nya : **“Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan”** maka Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/panduan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program

dan kegiatan beserta pendanaannya dalam rangka mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.

Rencana strategis Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan yang meliputi Kebijakan dan Program.



4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis PD yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah berdasarkan Visi dan Misi sesuai dokumen RPJMD 2019 – 2023 yaitu :

“Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah”

Indikator tujuan tersebut adalah “ Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB [%]” dan “Kontribusi Sektor ekonomi kreatif Terhadap PDRB [%]”.

Hal ini tidak bisa terlepas dari peranan semua stakeholder yang mempengaruhi aktifitas kepariwisataan di destinasi pariwisata dimaksud seperti masyarakat sekitar obyek wisata dan kelompok sadar wisata, peranan pemerintah daerah, para tour n’ travel dan biro perjalanan, swasta dan para investor, para komunitas wisata, perhimpunan – perhimpunan wisata baik perhimpunan hotel restoran, perhimpunan organisasi angkutan darat, perhimpunan pramuwisata dan lain-lainnya. Para stakeholders ini harus terkoneksi secara baik rencana pengembangan destinasinya.

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sesuai dengan Visi, Misi Gubernur Terpilih dan Tujuan Pengembangan Kepariwisata Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 maka ditetapkan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

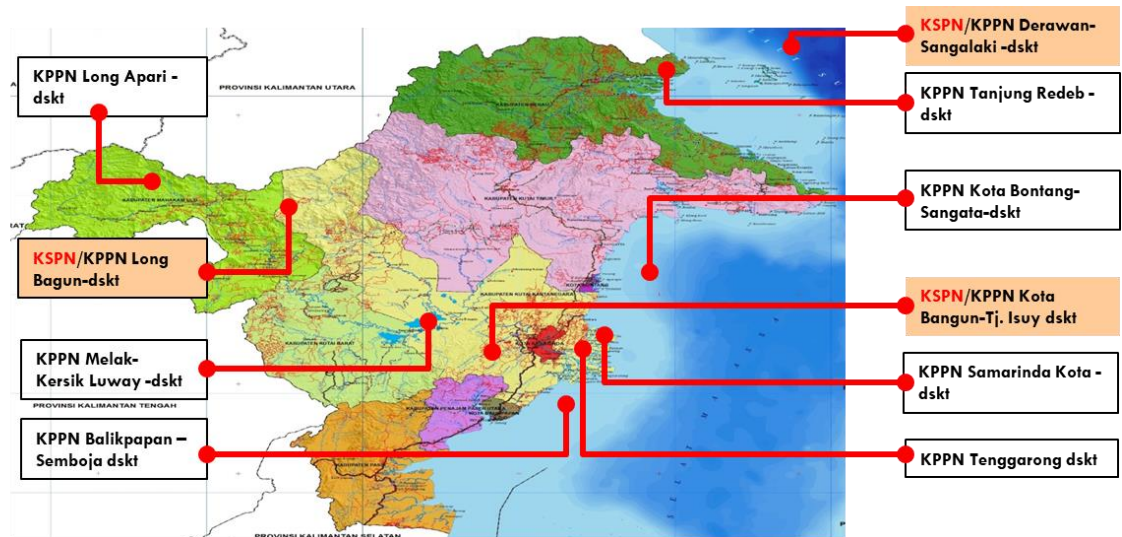
1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah.

Dengan indikator Sasaran :

- 1) Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara [orang]
- 2) Nilai Tambah Ekonomi Kreatif [Rupiah]

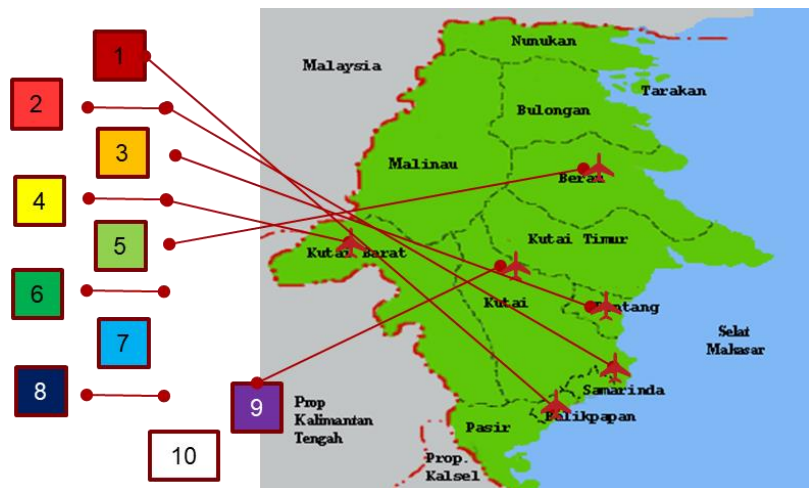
Gambar 4.1

Peta Penyebaran Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) Kalimantan Timur :



Peta Potensi Kondisi Existing dan Rencana Pengembangan Akses Udara , Darat, Laut/ Sungai Kalimantan Timur; Kondisi 2018.

 **BANDARA KALTIM**



Tabel 4.1
Jenis dan Kategori Bandara Kalimantan Timur

No	Nama Bandara IATA/CAO	Kategori	Kelas	Pengelola	Alamat
1	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport (Balikpapan)	Inter/ Domestik Airport	Kelas I	PT. Angkasa Pura I	I. Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan, Balikpapan Sel., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
2	Aji Pangeran Temungung Pranoto (Samarinda Baru) Not Available / Not Available	Domestik Airport	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Udara	Jalan Pipit No.22, Bandara, Sungai Pinang, Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda
3	Bontang Not Available / Not Available	Domestik Airport	Satpel	TNI	Kota Bontang, Kalimantan Timur, -
4	Datah Dawai DTD / WALJ	Domestik Airport	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Utara	Bandar Udara Data Dawai, Kab. Kutai Barat,
5	Barau/Kalimaru BEJ/WALK	Domestik Airport	Kelas II	Unit Penyelenggara Bandar Utara	Kab. Berau, Kalimantan Timur
6	Kota Bangun KOD/Not Available	Domestik Airport	Not Available	UPT Daerah / Pemda	Kab. Kutai Kartanegara
7	Long Apari Not Available	Domestik Airport	Satpel	TNI	Kec. Long Apari, Kab. Kutai Barat
8	Maratua Not Available	Domestik Airport	Satpel	Unit Penyelenggara Bandar Utara	Kepulauan Derawan, Kec. Maratua, Kab. Berau
9	Melalan Melak MLK / WALE	Domestik Airport	Kelas III	Unit Penyelenggara Bandar Utara	Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat
10	Paser Not Available	Domestik Airport	Kelas I	TNI	Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser
11	Paser Not Available / Not Available	Domestik Airport	Kelas I	TNI	Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser

5. Jaringan Transportasi Laut
A. Pelabuhan

No	NAMA PELABUHAN	LOKASI	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI (TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL)	ARAH PENGEMBANGAN RTRWP 2016-2036	
				HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	LOKASI DERMAGA
1	SEMAYANG	BALIKPAPAN	UTAMA (PU)	TETAP	SEMAYANG
2	SAMARINDA	SAMARINDA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	RELOKASI KE PALARAN
3	KAMPUNG BARU	BALIKPAPAN	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KAMPUNG BARU
4	TANJUNG LAUT	BONTANG	PENGUMPUL (PP)	TETAP	TANJUNG LAUT
5	TANJUNG SANTAN	KUTAI KERTANEGARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	MARANGKAYU
6	KUALA SAMBOJA	KUTAI KARTANEGARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KUALA SAMBOJA
7	SANGATTA	KUTAI TIMUR	PENGUMPUL (PP)	TETAP	KENYAMUKAN
8	PONDONG	PASER	PENGUMPUL (PP)	TETAP	PONDONG
9	PENAJAM PASER	PENAJAM PASER UTARA	PENGUMPUL (PP)	TETAP	PENAJAM
10	TELUK ADANG	PASER	PENGUMPUL (PP)	TETAP	TELUK ADANG
11	LHOK TUAN	BONTANG	PENGUMPUL (PP)	TETAP	LHOK TUAN
12	TANJUNG REDEB	BERAU	PENGUMPUL (PP)	TETAP	RELOKASI KE MANTARITIP
13	SANGKULIRANG	KUTAI TIMUR	PENGUMPAN REGIONAL (PR)	TETAP	SANGKULIRANG
14	TALISAYAN	BERAU	PENGUMPAN LOKAL (PL)	TETAP	TALISAYAN
15	MALOY	KUTAI TIMUR	-	PENGUMPUL	TELUK GOLOK
16	TG. BATU	BERAU	PENGUMPAN		

3. Rincian Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 A. Pelabuhan dan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau
 i. Hirarki Peran dan Fungsi Pelabuhan Sungai dan Danau

No.	PELABUHAN	LOKASI	HIRARKI PERAN DAN FUNGSI	ARAH PENGMBANGAN RTRWP 2016-2036
1	SEI KUNJANG	SAMARINDA	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
2	KOTA BANGUN	KUTAI KARTANEGARA	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
3	MELAK	KUTAI BARAT	ANTAR KAB/KOTA	TETAP
4	BATU DINDING (UJOH BILANG)	MAHAKAM HULU	ANTAR KAB/KOTA	TETAP

ii. Rincian Alur Pelayaran

No	TRAYEK	KEBERANGKATAN KAB/KOTA	TUJUAN KAB/KOTA	LINTAS	JARAK PELAYARAN
1.	SAMARINDA – LONG IRAM	SAMARINDA	KUTAI BARAT	ANTAR KABUPTEN	TERLETAK PADA ALUR PELAYARAN SUNGAI MAHAKAM DENGAN PANJANG ALUR 985 KM
2.	KOTA BANGUN – TENGGARONG – SAMARINDA DAN/ATAU KOTA BANGUN – MELAK – UJOH BILANG	KUTAI KARTANEGARA	SAMARINDA– KUTAI BARAT – MAHAKAM HULU	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPATEN	
3.	MELAK – TERING – LONG IRAM – KABUPATEN MAHAKAM ULU (LONG HUBUNG – LAHAM – LONG BAGUN)	KUTAI BARAT	MAHAKAM ULU	DALAM KABUPATEN / ANTAR KABUPATEN	
4.	UJOH BILANG – MELAK – KOTA BANGUN – SEI KUNJANG	MAHAKAM HULU	KUTAI BARAT – KUTAI KARTANEGARA – SAMARINDA	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPTEN	
5	SAMARINDA – TENGGARONG – MUARA KAMAN – KEHONGAN – KEMBANG JANGGUT – TABANG	SAMARINDA/ KUTAI KARTANEGARA	KUTAI KARTANEGARA /SAMARINDA	DALAM KABUPATEN /ANTAR KABUPTEN	

Sumber : Data Olah Kemenpar, 2018

Tabel 4.3

**TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA TAHUN 2019-2023					KONDISI AKHIR (2023)
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB [%]	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan [orang]	1) Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara [orang]	7.542.292	5.555.050	6.055.500	2.015.000	2.005.000	2.310.000	2.310.000
				~ Wisatawan Nusantara [orang]	7.479.868	5.500.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000
		2. Kontribusi Sektor ekonomi kreatif Terhadap PDRB [%]	2. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah	~ Wisatawan Mancanegara [orang]	62.424	55.500	55.500	15.000	5.000	10.000	10.000
				2) Nilai Tambah Ekraf [Rupiah (juta)]	90.637,81	96.621,77	96.621,77	96.805,35	97.095,77	97.532,70	97.532,70
				1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB [%]	8.97	9.43	9.43	9.52	9.67	9.91	9.91
				2. Kontribusi Sektor ekonomi kreatif Terhadap PDRB [%]	14.24	14.78	14.78	14.93	15.23	15.68	15.68

Keterangan : Indikator target kinerja Dinas Pariwisata Kalimantan Timur



Bekantan dan Mangrove

BAB V

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam pemilihan strategi tersebut menggunakan analisa SWOT sebagaimana berikut :

5.1 STRATEGI

Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi KALIMANTAN TIMUR 5 Tahun (2019 – 2023) maka untuk **mewujudkan Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah** perlu strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur

- ✓ Pengembangan potensi kepariwisataan berdasarkan 3 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kalimantan Timur
- ✓ Pengembangan Atraksi / Daya Tarik Wisata yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota melalui fasilitasi dan dukungan lintas sektor meliputi pengembangan wisata alam, wisata bahari, wisata minat khusus, wisata buatan dan wisata budaya.
- ✓ Meningkatkan kualitas sarana prasarana amenities pariwisata serta konektivitas di 10 Kabupaten/ Kota baik aksesibilitas darat, udara, dan laut/ sungai melalui dukungan lintas sektor
- ✓ Memperkuat promosi ciri khas (branding) potensi wisata prioritas daerah yang berdaya saing melalui penjualan langsung (direct sales), misi penjualan (sales mission), event festival, pameran (eksebis), table top yang intensif, kreatif, inovatif dan interaktif serta upaya-upaya kerjasama pemasaran kepariwisataan
- ✓ Meningkatkan kualitas, profesionalitas dan kapasitas sumber daya pariwisata, masyarakat dan pelaku industri jasa pariwisata melalui peningkatan kompetensi, pelatihan SDM, gerakan sadar wisata sapta pesona serta upaya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism).

2. Pengembangan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur

- ✓ sub sektor ekonomi kreatif unggulan (Kuliner, Kriya, Aplikasi dan Game) dan Sub sektor ekonomi potensial (Seni Pertunjukan, Fotografi/Videografi, Musik)

- ✓ Pengembangan potensi ekonomi kreatif masyarakat untuk memperkuat daya saing daya tarik destinasi wisata melalui fasilitasi dan dukungan serta peningkatan kualitas sumber daya pada sektor ; aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan maka perlu ditetapkan kebijakan umum adalah peningkatan peran budaya sebagai basis pengembangan kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi, penguatan/penajaman pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui:

1. Peningkatan Layanan Amenitas Produk Wisata Kaltim

Melalui program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

2. Peningkatan Layanan Pemasaran Produk Wisata dan Sub Sektor Ekraf Kaltim

Melalui program pemasaran pariwisata

3. Peningkatan kompetensi SDM Pemangku Produk Wisata Kaltim

Melalui program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Implementasi Peta Jalan Pengembangan Sub Sektor Ekraf Kaltim

Melalui program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

5. Penguatan Daya Saing Produk Sub Sektor Ekraf Kaltim

Melalui program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tabel 5.2

**VISI DAN MISI RPJMD DENGAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 - 2023**

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat			
Misi 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan			
Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Sasaran 13: Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah	1. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur 2. Pengembangan Ekosistem Sub Sektor ekonomi Kreatif Kalimantan Timur	1. Peningkatan Layanan Amenitas Produk Wisata Kaltim 2. Peningkatan Layanan Pemasaran Produk Wisata dan Sub Sektor Ekraf Kaltim 3. Peningkatan kompetensi SDM Pemangku Produk Wisata Kaltim 4. Implementasi Peta Jalan Pengembangan Sub Sektor Ekraf Kaltim 5. Penguatan Daya Saing Produk Sub Sektor Ekraf Kaltim



Desa Pela—Muara Danau Semayang

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 PROGRAM / KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi Wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, untuk meningkatkan ekonomi daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah maka guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta sinergitas antar pelaku wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2019 - 2023 menurut urusan pemerintahan (*yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019*). Adapun program-program tersebut terangkum dalam program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; [3.26.01]
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; [3.26.02]
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 3) Program Pemasaran Pariwisata; [3.26.03]
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ; [3.26.04]
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ; [3.26.05].
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber
 - b. Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

6.2. KELOMPOK SASARAN

Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata selama kurun waktu tahun 2019 - 2023, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Kelompok sasaran pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, adalah:

- a. Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Pariwisata;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Wisata;
- c. Pengembangan Industri Pariwisata;

2. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kelompok sasaran pengembangan Pemasaran, adalah:

- a. Penguatan Data dan Informasi Pariwisata;
- b. Pengembangan Promosi ;
- c. Pengembangan Kerjasama Pariwisata;

3. Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kelompok sasaran pengembangan SDM, adalah:

- a. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- b. Pengembangan SDM Usaha Pariwisata;
- c. Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf;

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kelompok sasaran pengembangan ekraf di kawasan strategis pariwisata, adalah:

- a. Pengembangan Sarpras Ekonomi Kreatif;
- b. Pengembangan Ruang Kreasi;
- c. Kerjasama Pengembangan Ekraf;

5. Bidang Sekretariat

Kelompok sasaran pengembangan Sekretariat, adalah:

- a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
- b. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran;

- g. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

6.3. PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi SKPD jangka menengah. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 5.1 hanya yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur.

Tabel 6.1

**RENCANA PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM
DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR APBD (MURNI) TAHUN 2021 - 2023**

No	Program Kerja	Kerangka Pendanaan (Rp.)		
		2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.845.063.400	16.822.555.500	16.590.000.000
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.674.685.000	7.602.445.000	6.310.000.000
3.	Program Pemasaran Pariwisata	3.509.422.600	3.260.000.000	2.700.000.000
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	2.794.999.500	2.000.000.000
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.547.085.000	4.020.000.000	3.400.000.000
JUMLAH		29.576.256.000	34.500.000.000	31.000.000.000

Catatan : Anggaran tahun 2021 dalam pelaksanaan

Tabel 6.3

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif

Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJKAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PAGU INDIKATIF (Rp)			Ket.	PJ Kegiatan
														2021	2022	2023	2021	2022	2023		
PROGRAM PERIORITAS																					
BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	1. Peningkatan Layanan Amenitas Produk Wisata Kaltim																
										URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							29.576.256.000	34.500.000.000	31.000.000.000		
						26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
						26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan	Destinasi	2	3	3	4.674.685.000	7.602.445.000	6.310.000.000	Goa Mengkuris - KSPP 2, Goa Rimba - KSPP 2, Danau Semayang - KSPP 3, Danau Jempang - KSPP 3, Danau Melintang - KSPP 3, Desa Muara Muntai - KSPP 3, Desa Semayang - KSPP 3)	
						26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Produk wisata yang dikelola	Produk Wisata	-	2	3	-	5.142.357.080	4.060.000.000	Home stay dan Kedai Kuliner	

2. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah

26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	-	1	2	0	294.045.000	500.000.000	1 Dokumen (1 Kajian Goa Mengkuri dan Goa Rimba di Kutai Timur)	Seksi Pengembangan DTW dan Kawasan Pariwisata
26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)	Jumlah Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan. Berkembang. Pemantapan. Revitalisasi)	Lokasi	-	1	2	-	3.684.415.240	3.560.000.000	1 Lokasi (Danau Semayang)	Seksi Pengembangan DTW dan Kawasan Pariwisata
26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola	produk wisata dalam kawasan strategis	2	1	2	720.000.000	1.079.638.920	750.000.000	6 Unit Kapal dan 2 Desa Wisata yang di supervisi mengenai CHSE	
26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	-	6	8	-	405.828.000	500.000.000	6 Unit (2 unit Danau Semayang, 2 Unit Danau Jempang, 2 Unit	Seksi Pengembangan DTW dan Kawasan Pariwisata

						Provinsi									Danau Melintang)		
26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	-	2	4	-	108.446.000	250.000.000	250.000.000	2 Laporan (Desa Muara Muntai dan Desa Semayang)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya	Destinasi Pariwisata a	3	10	10	3.954.685.000	700.000.000	1.050.000.000	10 DTW (Kabupaten / Kota)			
26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	-	10	10	-	233.296.000	250.000.000	250.000.000	10 Dokumen (Panji-panji)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	50 (kelompok)	1	1	714.880.000	625.422.000	800.000.000	1 (Laporan an Jambo re Pokdarwis)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina	Usaha Pariwisata a	-	15	15	0	680.449.000	450.000.000	450.000.000	15 Usaha		
26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tersedianya Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	-	1	1	0	132.047.280	150.000.000	150.000.000	1 Laporan an FGD Berau	Seksi Industri Pariwisata a	

					26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	-	10	10	0	110.824.000	150.000.000	10 Usaha	Seksi Industri Pariwisata
					26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Terfasilitasinya Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	-	5	5	0	151.250.000	150.000.000	5 Usaha	Seksi Industri Pariwisata
					26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Kunjungan Wisatawan - wisatawan nusantara - wisatawan mancanegara	Orang	2 juta 15 ribu	2 juta 5 ribu	2,3 juta 10 ribu	3.509.422.600	3.260.000.000	2.700.000.000		
					26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Kaltim	Daerah/ Kota	6	6	6	3.509.422.600	3.260.000.000	2.700.000.000		
					26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	9	4	5	2.152.972.600	362.561.000	500.000.000	Dokumen (pameran an kaltim Expo, Expolre Borneo, TMII, Borneo Extravaganza)	Seksi Promosi Pariwisata

3. Peningkatan kompetensi SDM Pemangku Produk Wisata Kaltim	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	-	5	6	499.450.000	500.452.000	500.000.000	1 Pembuatan Video, Laporan Table Top, Famtrip, Bali beyond, publikasi Event Kepariwisata	Seksi Promosi Pariwisata
	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi. Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi. Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi. Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	10	10	10	857.000.000	473.600.000	700.000.000	Data wisatawan, dll	Seksi Data dan Informasi Pariwisata
	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	3	5	-	817.468.000	1.000.000.000	APT Pranoto MICE Duta Puteri	Seksi Kerjasama Pariwisata
	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi	%	90	95	97	4.547.085.000	4.020.000.000	3.400.000.000		
	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina	Kegiatan	9	9	9	4.547.085.000	4.020.000.000	3.400.000.000		

26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	120	90	716.25.325	330.865.600	270.000.000	Bimtek dan Workshop	Seksi Pengembangan SDM Ekraf
26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	230	120	100	858.110.895	333.690.000	270.000.000	Bimtek dan Workshop	Seksi Pengembangan SDM Usaha Pariwisata
26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	180	30	25	1.018.350.445	126.281.400	100.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi	Seksi Pengembangan SDM Ekraf
26	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan		9	9	1.586.600.000	226.593.000	300.000.000	Kegiatan	Seksi Pengembangan SDM Usaha Pariwisata

		26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	250	280	500	714.800.000	811.160.000	1.900.000.000	Bimtek dan Workshop	Seksi Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf
2. Pengembangan Ekosistem Sub Sektor ekonomi Kreatif Kalimantan Timur	1. Implementasi Peta Jalan Pengembangan Sub Sektor Ekraf Kaltim	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	-	23,5 / 4 Sub Sek	23,5 / 4 Sub Sek	-	2.794.999.500	2.000.000.000	1. Kuliner 2. Kriya 3. Wastr 4. Aplikasi dan Game	
		26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah kota kreatif yang dikembangkan	Kota Kreatif	-	3	3	-	2.594.999.500	1.800.000.000	Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Paser	
	2. Penguatan Daya Saing Produk Sub Sektor Ekraf Kaltim	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit		4	8		289.872.000	400.000.000	Sarana EKRAF	Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana EKRAF
		26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang	Laporan		7	8		1.315.066.272	1.400.000.000	Event / Festival, Lomba, Workshop,	Seksi Pengembangan Ruang Kreasi

						Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif									dan Sosialisasi	
26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Jenis Ekosistem Ekraf yang dikembangkan	Jenis Ekosistem Ekraf	-	3	3	-	200.000.000	200.000.000	1. Kuliner 2. Kriya / Wastra 3. Aplikasi dan Game		
26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait. Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait. Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		1	2		81.025.202	100.000.000	Kekayaan Intelektual (HKI) / Sosialisasi HKI		Seksi Kerjasama Pengembangan EKRAF
26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen		5	7		80.191.000	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi, Dialog		Seksi Kerjasama Pengembangan EKRAF

BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		PAGU INDIKATIF (Rp)				Ket.	PJ Kegiatan
								2021	2022	2023	2021	2022	2023		
NON PERIORITAS DAN RUTIN															
XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pariwisata	%	95	95	95	16.845.063.400	16.822.555.500	17.150.000.000		Subag Perencanaan
XX	01	1.0 1		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	11	11	11	-	1.202.512.949	1.170.000.000		
XX	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6		1.000.000.000	1.000.000.000	Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, RKT	
XX	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	3		100.000.000	100.000.000	Tepra, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra	Subbag Keuangan
XX	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	2		102.512.949	70.000.000	LKJIP, LPPD	
XX	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji, tunjangan dan jasa administrasi kantor	Bulan	12	12	12	-	11.638.032.551	11.750.000.000		
XX	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	45	45			11.000.000.000	45 ASN per Jan 2022	Subbag Umum
XX	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	3			750.000.000	Daftar Honor 12 Bulan [KPA, PPTK, Pengelola Barang]	
XX	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12		1.578.290.772	1.658.500.000		

XX	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6	7	20.000.000	19.954.000	20.000.000	alat listrik	
XX	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	17	18	1.403.695.300	969.007.000	950.000.000	ATK, Bahan kimia, cetakan, kelengkapan komputer, surat kabar, pembersih	
XX	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	191.500.000	126.909.000	130.000.000	bbm, rapat	
XX	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	59.500.000	69.292.000	70.000.000	cetak, penggandaan	
XX	01	1.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	40	70	695.144.800	337.282.791	488.500.000		
XX	01	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	12	12		2.247.794.228	2.421.500.000		Subbag Umum
XX	01	1.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12			231.000.000	Rutin	
XX	01	1.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12			151.500.000	Rutin	
XX	01	1.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2			2.039.000.000	Non ASN, Cleaning servuces	
XX	01	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	12	12	12		155.925.000	150.000.000		
XX	01	1.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	18			150.000.000	10 r4, 8 r2	



Lamin Mancong—Kutai Barat

BAB VII

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN P-RPJMD KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur periode 2019 - 2023 yang tertuang dalam Perubahan - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur adalah mendukung misi ke-2 “Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”, Tujuan ke-3 yaitu “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”, Sasaran 13 “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Ekonomi Daerah”.

Bidang Urusan Pariwisata dalam P-RPJMD 2019 - 2023 secara detail diuraikan sebagai berikut :

Strategi :

- 1) Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur

Informasi tentang 3 KPPP dan 3 KSPP berdasarkan RIPPARDA

Tabel 7.1

Rumusan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

No	Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
1	DPP 1 Tanjung Redep – Bontang dan sekitarnya	KPPP 1 Sangata – Bontang dan sekitarnya	KSPP 1 Derawan – Biduk Biduk dan sekitarnya KSPP 2 Sangkulirang – Mangkalihat dan sekitarnya

2	DPP 2 Samarinda – Tanah Grogot dan sekitarnya	KPPP 2 Samboja – Balikpapan – Penajam – Tanah Grogot dan sekitarnya	KSPP 3 Samarinda – Tenggarong – Tanjung Issuy dan sekitarnya
		KPPP 3 Ujoh Bilang – Long Bagun dan sekitarnya	

Pengembangan destinasi yang akan dilakukan 2021 s/d 2023 adalah :

DPP 2 (smd, tana grogot dskt) yang dikembangkan :

- ~ KPPP2 samboja penajam dskt (penguatan daerah penyangga IKN)
- ~ KSPP 3 SMD,TGR, Tj Issuy dskt (3 danau)

DPP 1 (Tj Redeb – bontang, dskt)

- ~ KPPP1 (Sanggatta - bontang dskt)
- ~ KSPP 1 (Derawan, biduk-biduk dskt)
- ~ KSPP 2 (sangkulirang mangkalihat dskt)

Pengembangan destinasi dilakukan dalam bentuk : penyediaan sarpras penunjang kepariwisataan, penyediaan profiling investasi kawasan pariwisata, pemberdayaan masyarakat wisata, penguatan pelaku usaha pariwisata, kemitraan asosiasi kepariwisataan, penguatan pemasaran untuk produk wisata kaltim dan peningkatan SDM

2) Pengembangan Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur.

Bentuk pengembangan sub sektor ekraf meliputi :

- ✓ Berdasarkan dokumen TALANPEKDA 2021 – 2025
- ✓ Penguatan ekosistem ekraf baik berupa proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi , maupun konservasi sesuai dengan kebutuhan sub sektor ekraf unggulan dan prioritas kaltim yang meliputi 6 sub sektor unggulan dan prioritas kaltim yaitu :
 - ~ Kuliner
 - ~ Kriya dan wastra
 - ~ Aplikasi dan games developer
 - ~ Seni pertunjukan
 - ~ Videography, Film dan photography
 - ~ Musik
- ✓ Melakukan perlindungan terhadap karya pelaku ekraf
- ✓ Fasilitasi amenities sarpras kota kreatif
- ✓ Mengembangkan ruang kreasi bagi pelaku ekraf
- ✓ Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekraf
- ✓ Memfasilitasi kemitraan Pengembangan ekraf
- ✓ Penyusunan database subsektor ekraf kaltim khususnya sub sektor unggulan dan prioritas

Arah Kebijakan :

1) (2) Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII Sebagai Etalase Seni Budaya Kaltim Tahun 2022-2023

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
I	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata					
1.	MICE Pariwisata Kaltim	- Pameran Promosi Pariwisata - Table Top	Pemasaran Pariwisata Kerjasama/Penjualan Paket Perjalanan Wisata	350.000.000	TMII Anjungan Kaltim	-Dispar Kab/Kota -ASITA Kaltim -ASITA DKI Jakarta -Dekranasda Kaltim - Disperindagkop
II	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual					
1.	Festival Kreatif Kaltim (fashion show, musik etnik daerah, kuliner daerah, kriya, seni pertunjukkan, pameran foto, Lomba Foto dalam anjungan TMII Kaltim)	1 Kegiatan	Aktualisasi Pelaku Ekonomi Kreatif & Promosi Pariwisata Daerah	250.000.000	TMII Anjungan Kaltim	- Dispar Kab/Kota - Seniman Kaltim - Dekranasda Kaltim - Disperindagkop - Pelaku Kuliner Kaltim
2.	Visit Kaltim Fest (Pertunjukkan seni daerah, eksebisi permainan tradisional, workshop tari Jepen Kutai, parade budaya)	1 Kegiatan	Diplomasi & Promosi Seni Budaya Kaltim	250.000.000	TMII Anjungan Kaltim	- Dispar Kab/Kota - Pelaku Ekraf Kaltim - Dekranasda Kaltim

2) (13) Pengembangan Pariwisata Berbasis Kerakyatan dan Potensi Daerah Tahun 2022-2023.

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual						

1.	Workshop Koreografi (60 Orang)	3 Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pertunjukan Seni Tari Daerah	450.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Pelaku Tari Desa Wisata
2.	Workshop Musik (60 Orang)	3 Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pertunjukan Seni Musik Daerah	450.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Pelaku Seni Musik Desa Wisata
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
1	Fasilitasi Amenitas Homestay (matras, bantal, guling berikut seprainya)	100 Homestay	Insentif Bagi Penyedia Homestay di Desa Wisata 3 Danau	150.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Dispar Kukar & Kubar Pokdarwis/Pengelola Homestay
2	Bimtek Homestay	120 Orang 3 Paket	Standarisasi Pelayanan Homestay	600.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Dispar Kukar & Kubar Pokdarwis/Pengelola Homestay
3	Bimtek Penyusunan Paket Wisata Desa	120 Orang 3 Paket	Tersusunnya Paket Perjalanan Wisata Desa yang unik dan menarik	600.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Dispar Kukar & Kubar Pokdarwis/Pengurus Desa Wisata
4	Pelatihan Penyajian Kuliner	120 Orang 3 Paket	Peningkatan Tatacara Penyajian & Kualitas Kuliner	400.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Pokdarwis/Pelaku Kuliner
5	Pelatihan Service Excellent & hospitality	120 Orang 3 Paket	Peningkatan Keramah tamahan Masyarakat & Pelayanan Wisata Desa	400.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Penyedia Jasa Layanan Wisata Desa dan Tokoh Masyarakat
6	Pelatihan sadar wisata dan sapta pesona	120 Orang 3 Paket	Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk mendukung wisata desa	400.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Pokdarwis Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Tokoh Wanita Tokoh Agama

- 3) (30) Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata Tahun 2022-2023.

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
3.26.02						

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
1.	Pembuatan Sarpras Apung (Homestay/lodge)	3 Unit	Alternatif Akomodasi di Kawasan 3 Danau	800.000.000	Danau Semayang dan Sekitarnya	Aset pemprov. Kaltim
2.	Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner	2 Unit	Dapat Menjadi Tempat Pertemuan & Kuliner di Wisata 3 Danau	450.000.000	Danau Jempang dan Sekitarnya	Kades dan Masyarakat Pariwisata
3.	Pengadaan Perahu Wisata Bermotor	4 Unit	Tersedianya Perahu Wisata Kawasan Wisata 3 Danau	1.150.000.000	1.Danau Melintang dan Sekitarnya, 2.Danau Jempang dan Sekitarnya	Kades dan Masyarakat Pariwisata
4.	Supervisi Desa Wisata dan Penerapan CHSE	7 Desa Wisata	Jumlah Masyarakat Sadar Wisata yang diberdayakan	250.000.000	1. Desa Pela 2. Desa Muara Enggelam 3. Desa Melintang 4. Muara Muntai 5. Desa Semayang 6. Desa Jempang 7. Muara Wis	Kades, Pokdarwis, Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
1.	Pembuatan Sarpras Apung (Homestay/lodge)	3 Unit	Alternatif Akomodasi di Kawasan 3 Danau	800.000.000	Danau Semayang dan Sekitarnya	Aset pemprov. Kaltim
2.	Pembuatan Sarpras Terapung Kedai Kuliner	2 Unit	Dapat Menjadi Tempat Pertemuan & Kuliner di Wisata 3 Danau	450.000.000	Danau Jempang dan Sekitarnya	Kades dan Masyarakat Pariwisata
3.	Pengadaan Perahu Wisata Bermotor	4 Unit	Tersedianya Perahu Wisata Kawasan Wisata 3 Danau	1.150.000.000	1.Danau Melintang dan Sekitarnya, 2.Danau Jempang dan Sekitarnya	Kades dan Masyarakat Pariwisata
4.	Supervisi Desa Wisata dan Penerapan CHSE	7 Desa Wisata	Jumlah Masyarakat Sadar Wisata yang diberdayakan	250.000.000	1. Desa Pela 2. Desa Muara Enggelam 3. Desa	Kades, Pokdarwis, Dinas Perikanan dan Kelautan

					Melintang 4. Muara Muntai 5. Desa Semayang 6. Desa Jempang 7. Muara Wis	
--	--	--	--	--	---	--

Tahun 2022

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata						
1.	Pelatihan Penyusunan Informasi Pariwisata	3 kali (75 orang)	Tersedianya Data dan Informasi Pariwisata di Desa Wisata	450.000.000	1.Danau Semayang, 2.Danau Melintang, 3,Danau Jempang	Kemenpar RI, Dispar Kab/kota, Pokdarwis, Industri Pariwisata
2.	MICE Ekowisata Berbasis Sungai dan Danau	60 Orang	Tersedianya Rekomendasi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Sungai dan Danau	350.000.000	Desa Wisata 3 Danau	NGO, Akademisi, Penggiat Ekowisata, Komunitas

Tahun 2023

No	Nomenklatur Program	Rincian Output	Manfaat	Indikasi Pendanaan	Lokasi	Pihak Terkait
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata						
1.	Famtrip Ekowisata di Sungai dan Danau	25 Orang	Publikasi Ekowisata Sungai dan Danau	180.000.000	Desa Wisata 3 Danau	Blogger, Traveler, Milenial, Jurnalis, Komunitas
2.	Lomba Foto Ekowisata Tiga Danau	Foto Finalis dan Pemenang	Promosi atraksi wisata Tiga Danau	50.000.000	Kawasan 3 Danau	Komunitas, Fotografer,
3.	Pembuatan Video Produk Wisata Tiga Danau	Video Promosi Pariwisata 3 Danau	Publikasi dan Promosi wisata Tiga Danau	150.000.000	Kawasan 3 Danau	Komunitas Videografi

Program Prioritas :

- 1) 3.26.02 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2) 3.26.04 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Program :

- 1) Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) yang di kembangkan [Destinasi].
- 2) Jumlah sub sektor ekraf yang dikembangkan [Sub sektor Ekraf].

Capaian target indikator program tersebut diuraikan secara detail pada tabel berikut :

Program Prioritas	Indikator Kinerja	2019 Kinerja	2020 Kinerja	2021 Kinerja	2022 Kinerja	2023 Kinerja
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang di kembangkan [Destinasi]	3 [Destinasi] . KPPP pesisir (kutim) dan KPP kawasan sedang berkembang (Kukar dan Berau)	3 [Destinasi] . KPPP Pesisir (Kutim dan Paser) dan KPP sedang berkembang (Kukar dan Berau)	3 [Destinasi] . KPPP Pesisir (Berau, Paser, Kukar & Kutim)	7 [Destinasi] . 3 Danau (Desa Pela, Tanjung Issuy)	10 [Destinasi] Goa Mengkuris - KSPP 2 , Goa Rimba - KSPP 2, Danau Semayang - KSPP 3, Danau Jempang - KSPP 3, Danau Melintang - KSPP 3, Desa Muara Muntai - KSPP 3, Desa Semayang - KSPP 3
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	Jumlah sub sektor ekraf yang dikembangkan [Sub sektor Ekraf]	3 [Sub Sektor] . Kriya, Seni Pertunjukan, Fotografi/ Videografi	3 [Sub Sektor] . Kriya, Seni Pertunjukan, Fotografi/ Videografi	3 [Sub Sektor] . Kriya, Seni Pertunjukan, Fotografi/ Videografi	3 [Sub Sektor] . Kriya, Seni Pertunjukan, Fotografi/ Videografi	3 [Sub Sektor] . Kriya, Seni Pertunjukan, Fotografi/ Videografi

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel VII.1.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR
(MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR)
TA 2019 - 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada tahun awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018 (0)	2019 (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
	Urusan Pilihan : Pariwisata						
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap nilai tambah bruto (PDRB) [%]	8.97	9.43	9.43	9.52	9.67	9.91
2	Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap nilai tambah bruto (PDRB) [%]	14.24	14.78	14.78	14.93	15.23	15.68

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur



Pohon Ulin—Sangkima

BAB VIII PENUTUP

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kalimantan Timur, P-RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI (Teknis). Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2019 - 2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran tujuan bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kalimantan Timur dengan sumber dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI.

Rencana Strategis yang telah disusun ini, diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kepariwisataan di Kalimantan Timur, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas, dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019 - 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan yang semakin meningkat/ maju dalam rangka mewujudkan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah.



Danau Kakaban—Berau

LAMPIRAN—LAMPIRAN

:: Renstra Dinas Pariwisata Th. 2019—2023 ::